

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---



**JUDUL :**  
**PEMANFAATAN BONUS DEMOGRAFI**  
**DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI GLOBAL**

**OLEH :**  
**KOLONEL INF YUDIANTO PUTRAJAYA, S.E., M.M.**  
**NOMOR PESERTA : 096**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERORANGAN (TASKAP)**  
**PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXI**  
**LEMHANNAS RI**  
**TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan petunjuk serta karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan tugas Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) yang berjudul "**Pemanfaatan Bonus Demografi Dalam Meningkatkan Kompetensi Global**".

Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini berdasarkan pada Keputusan Gubernur Lemhannas Nomor 81 Tahun 2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Daftar Judul Taskap Peserta PPRA LXI Tahun 2020 Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, iijinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI atas atensi dan perhatiannya sehingga kami dapat mengikuti PPRA LXI Tahun 2020. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Marsekal Muda TNI (Purn) Sumarman, S.E. selaku Tutor Taskap dan kepada semua pihak yang telah membantu memberikan masukan dan koreksi hingga selesainya Taskap ini.

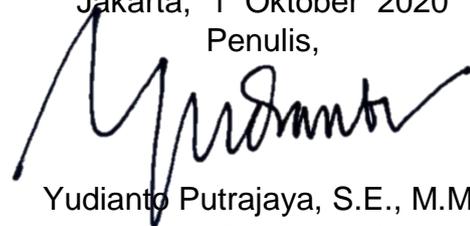
Kami menyadari bahwa Taskap ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu, penulis dengan senang hati akan menerima saran dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan, semoga Taskap ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama Pemerintah guna Memanfaatkan Bonus Demografi dalam Meningkatkan Kompetensi Global.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan petunjuk serta perlindungan-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan Bangsa Indonesia yang kita cintai bersama.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 1 Oktober 2020

Penulis,



Yudianto Putrajaya, S.E., M.M.  
Nomor Peserta : 096

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yudianto Putrajaya, S.E., M.M.

Pangkat : Kolonel Inf

Jabatan : Pamen Denma Mabasad

Instansi : TNI AD

Alamat : Mabasad, Jl.Veteran No.5, Gambir, Jakarta Pusat

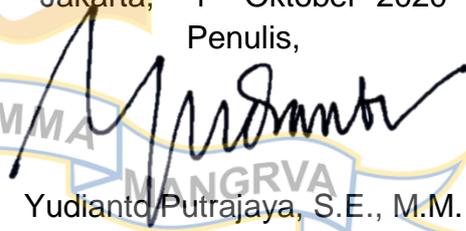
Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXI Lemhannas RI Tahun 2020 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruh tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

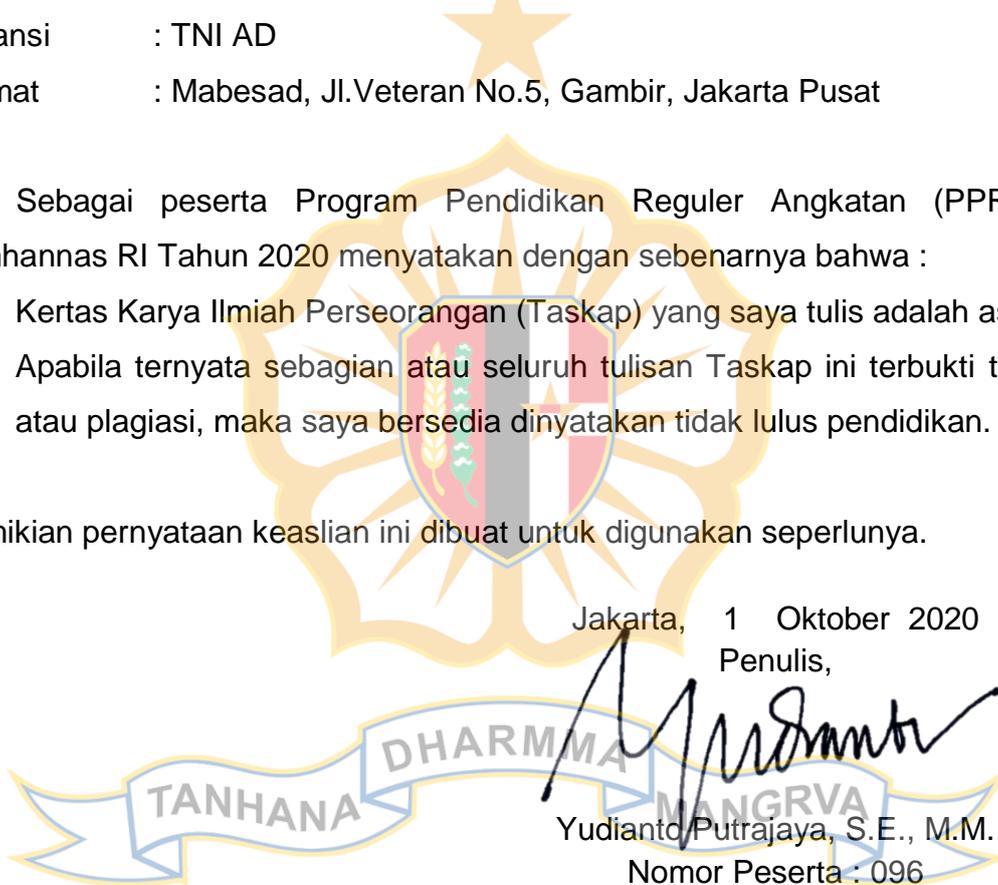
Jakarta, 1 Oktober 2020

Penulis,



Yudianto Putrajaya, S.E., M.M.

Nomor Peserta : 096



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---

**LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP**

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari :

Nama : Kolonel Inf Yudianto Putrajaya, S.E., M.M.  
Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXI tahun 2020  
Judul Taskap : Pemanfaatan Bonus Demografi Dalam Meningkatkan Kompetensi Global

Taskap tersebut di atas telah ditulis “sesuai/~~tidak sesuai~~” dengan Juknis Penulisan Ilmiah Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020, karena itu “layak/~~tidak layak~~” dan “disetujui/~~tidak disetujui~~” untuk diuji.

“Coret yang tidak diperlukan.

Jakarta, 1 Oktober 2020  
Tutor Taskap,

  
Sumarman, S.E.  
Marsekal Muda TNI (Purn)



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Pernyataan Keaslian</b> .....	ii
<b>Lembar persetujuan Tutor</b> .....	iii
<b>Daftar Isi</b> .....	iv
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah .....	3
3. Maksud dan Tujuan .....	4
4. Ruang Lingkup dan Sistematika .....	4
5. Metode dan Pendekatan .....	5
6. Pengertian .....	6
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
7. Umum .....	8
8. Peraturan Perundang-undangan .....	8
9. Kerangka Teoretis.....	11
10. Data dan Fakta.....	15
11. Lingkungan Strategis .....	18
 <b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
12. Umum .....	22
13. Kesiapan Pemerintah Menghadapi Bonus Demografi.....	22
14. Kondisi Daya Saing SDM Indonesia Dalam Persaingan Global.....	35
15. Konsepsi Kebijakan Pemanfaatan Bonus Demografi Dalam Meningkatkan Kompetensi Global.....	44
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
16. Simpulan.....	59
17. Rekomendasi.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	61
 <b>DAFTAR LAMPIRAN :</b>	
1. Alur Pikir	
2. Daftar Riwayat Hidup	

# PEMANFAATAN BONUS DEMOGRAFI DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI GLOBAL

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang.

Indonesia lima tahun mendatang akan memasuki bonus demografi, dimana penduduk angka usia produktif lebih besar dari angka usia tidak produktif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, penduduk Indonesia berjumlah 265 juta jiwa, jumlah generasi milenial mencapai 24% atau setara 63,6 juta jiwa dan jumlah usia produktif yang berusia 14-64 tahun sekitar 67,6% atau setara 179,1 juta jiwa. Di prediksi, tahun 2024 populasi penduduk Indonesia mencapai 282 juta jiwa dan tahun 2045 mencapai 317 juta jiwa<sup>1</sup>.

Berdasarkan proyeksi kependudukan yang dibuat oleh Bappenas bersama BPS dan UNPF, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia tahun 2035 sebesar 305,6 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk mencapai 0,62%<sup>2</sup>, jumlah tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia selain China, India dan Amerika Serikat.

Sebaran penduduk yang tidak merata menjadi kendala bagi pemerintah dalam pemanfaatan bonus demografi di Indonesia. Menurut Dorodjatun Kuntjorojakti, migrasi dan persebaran penduduk berpengaruh terhadap tingkat kemakmuran sebuah masyarakat dan laju pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Seperti contoh kemakmuran masyarakat Amerika Serikat dan Kanada, diakibatkan oleh arus migrasi dan persebaran penduduk yang sangat besar dari Benua Eropa pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Demikian juga

---

<sup>1</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa>. Diunduh tanggal 8 Juni 2020.

<sup>2</sup> Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, yang disusun oleh BPS bersama dengan Bappenas dan UNPF. Hal 22

di Asia dimana Jepang mengalami kemajuan pesat setelah terjadinya Restorasi Meiji pada awal abad ke-19 dengan pembangunan industri besar-besaran mencontoh beberapa negara Eropa seperti Jerman, Perancis, Inggris dan Amerika. Hal yang sama juga terjadi dengan China yang menjadi raksasa ekonomi dunia dengan kekuatan jumlah penduduk yang sangat besar sebagai kekuatan pasar domestik<sup>3</sup>.

Salah satu upaya yang perlu kita lakukan adalah memanfaatkan secara optimal bonus demografi untuk meningkatkan persaingan global. Hal ini sangat penting karena Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk sangat besar, didukung oleh potensi kekayaan alam yang besar, tapi pada persaingan tingkat global Indonesia berada pada level rendah.

Menurut data *World Economic Forum* (WEF) yang merilis hasil Global Talent Competitiveness Index (GTCI) tahun 2019, negara dunia dengan tingkat kompetensi paling tinggi adalah Swiss, Singapura, Amerika, Norwegia, Denmark, Swedia, Finlandia, Belanda, Inggris dan Luxemburg. Untuk negara dengan tingkat penghasilan menengah perkapita, Malaysia berada pada urutan ke-27 masuk tiga besar dengan daya saing global bersama Costarica (34) dan Azerbaizan (43), sedangkan Indonesia masuk pada urutan ke-67 dibawah Filipina (58) dan Ukraina (63)<sup>4</sup>.

Dari 12 (dua belas) pilar yang menjadi penilaian *World Economic Forum* (WEF), Indonesia mengalami penurunan pada lima pilar yaitu adopsi TIK dengan skor 55,4, pilar kesehatan mengalami penurunan dengan skor 70,8, pilar kemampuan kualitas SDM dengan penurunan pada indikator kemampuan (*skill set*) para lulusan, kemampuan digital pada populasi produktif dan kemudahan mendapatkan tenaga kerja terampil. Penurunan juga terjadi pada pilar pasar tenaga kerja dengan skor 57,7 pada indikator perbandingan bayaran produktif, tarif pajak tenaga kerja, fleksibilitas penentuan upah, kebijakan pasar tenaga kerja yang berlaku saat ini dan

---

<sup>3</sup> Dorodjatun Kuntjorojakti, 2012. Menerawang Indonesia Pada Dasawarsa Ketiga Abad ke-21. Jakarta, Alvabet. Hal. 60-61

<sup>4</sup> <https://berempat.com/news/4874/di-bawah-thailand-dan-filipina-indonesia-peringkat-ke-67-gtci-2019/>. Diunduh tanggal 8 Juni 2020.

penurunan daya saing pada sektor pilar produk di pasar<sup>5</sup>. Oleh sebab itu diperlukan sebuah kajian yang lebih komprehensif tentang analisis pemanfaatan bonus demografi untuk meningkatkan kompetensi global.

## 2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat kita lihat bahwa persoalan bonus demografi masih belum dimanfaatkan secara lebih baik dan membuat daya saing global bangsa Indonesia sangat rendah. Disamping itu ketergantungan terhadap Sumber Kekayaan Alam sudah harus mulai dikurangi karena sifatnya yang tidak bisa diperbarui dan akan habis.

Rendahnya kualitas pendidikan nasional kita dalam persaingan global, diperkuat dengan turunnya hasil PISA (*Programme for International Student Assesment*), sebuah program pengukuran kemampuan pelajar di tingkat internasional pada aspek membaca, matematika dan kinerja sains, yang dikeluarkan oleh OECD (*Organisation Economic Cooperation Development*) dimana hasil PISA 2018, Indonesia mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015, dimana kategori kemampuan membaca Indonesia berada pada peringkat 74. Skor rata-rata Indonesia adalah 371, berada di bawah Panama yang memiliki skor rata-rata 377. Sedangkan peringkat pertama diduduki oleh China dengan skor rata-rata 555. Posisi kedua ditempati oleh Singapura dengan skor rata-rata 549 dan Makau peringkat tiga dengan skor rata-rata 525. Sementara Finlandia yang kerap dijadikan percontohan sistem pendidikan, berada di peringkat 7 dengan skor rata-rata 520. Sedangkan kategori matematika, Indonesia berada di peringkat 73 dengan skor rata-rata 379. Indonesia berada di atas Arab Saudi yang memiliki skor rata-rata 373. Peringkat satu, masih diduduki China dengan skor rata-rata 591<sup>6</sup>.

Berdasarkan uraian dan analisis permasalahan di atas, maka rumusan masalah dari penulisan Taskap ini adalah ***Bagaimana Memanfaatkan Bonus***

---

<sup>5</sup> <https://nasional.kontan.co.id/news/peringkat-daya-saing-global-indonesia-turun-5-peringkat-menjadi-50-dunia>. Diunduh tanggal 8 Juni 2020.

<sup>6</sup> Baca Laporan Hasil PISA 2018 yang dikeluarkan oleh OECD.

***Demografi Dalam Meningkatkan Kompetensi global ?*** Selanjutnya dari permasalahan tersebut dapat dirumuskan beberapa pertanyaan kajian yaitu:

- a. Bagaimana kesiapan pemerintah Indonesia dalam menghadapi bonus demografi?
- b. Bagaimana kondisi daya saing SDM Indonesia dalam persaingan global?
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam memanfaatkan bonus demografi untuk meningkatkan kompetensi global?

### 3. Maksud dan Tujuan.

#### a. Maksud.

Menganalisis permasalahan terkait persoalan pemanfaatan bonus demografi dalam meningkatkan kompetensi global serta memberikan rekomendasi kebijakan terkait permasalahan tersebut.

#### b. Tujuan.

Tujuan penulisan Taskap ini adalah sebagai sumbangsih pemikiran dari peserta PPRA LXI Lemhanas RI Tahun 2020 kepada pemerintah dan stakeholder terkait lainnya tentang bagaimana pemanfaatan Bonus Demografi dalam meningkatkan kompetensi global.

### 4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

a. **Ruang lingkup.** Penulisan Taskap ini dibatasi pada persoalan pemanfaatan bonus demografi dan peningkatan kompetensi global.

b. **Sistematika.** Penulisan Taskap ini disusun sebagai berikut:

- 1) Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang yang menjelaskan tentang kondisi faktual terkait bonus demografi dan persoalan di dalamnya. Dari latar belakang tersebut dikerucutkan menjadi rumusan masalah yang akan dibahas pada bab berikutnya. Dalam bab ini juga dijelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup

dan sistematika, metode dan pendekatan serta beberapa pengertian tentang istilah bonus demografi dan kompetensi global.

- 2) Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini menjelaskan tentang beberapa literatur yang dijadikan landasan pemikiran dalam penulisan Taskap ini, mencakup aspek perundang-undangan, kajian teori, data dan fakta terkait serta lingkungan strategi yang relevan.
- 3) Bab III Pembahasan. Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis penulis dalam menjawab rumusan masalah dengan membahas relevansi antara realita yang ada (UU, kajian teori, data dan fakta yang ada serta aspek lingkungan strategis) dikaitkan dengan tiga pertanyaan kajian dalam Taskap ini.
- 4) Bab IV Penutup. Bab ini merupakan simpulan dan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah dan stakeholder terkait dalam mengatasi masalah pemanfaatan bonus demografi dan peningkatan kompetensi global.

## 5. Metode dan Pendekatan.

a. **Metode.** Penulisan taskap ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui studi literatur yaitu dengan cara:

- 1) Menelusuri literatur terkait kependudukan (demografi) terkini untuk mencari teori-teori yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM dikaitkan dengan kependudukan.
- 2) Mengikuti perkembangan hasil-hasil penelitian terkait bidang kependudukan, pendidikan dan persoalan SDM.
- 3) Memanfaatkan data-data sekunder untuk kemudian data tersebut dirubah dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami sehingga menjadi informasi yang sangat berharga.

Teknik analisa data dilakukan secara deskriptif analitis. Beberapa data hasil temuan dari kajian literatur dilakukan pendalaman, verifikasi dan klasifikasi. Analisa interpretasi data juga dilakukan dengan melihat

fokus permasalahan Taskap berdasarkan hasil temuan, lalu dilakukan *gap analysis* antara idealitas (perspektif teori, landasan hukum, lingkungan strategis) dengan data dan fakta yang ada, sehingga bisa dirumuskan solusinya.

- b. **Pendekatan.** Penulisan Taskap ini menggunakan perspektif Ketahanan Nasional dengan analisis multi disiplin ilmu sesuai kerangka teori yang digunakan.

## 6. Pengertian.

- a. **Bonus Demografi**, adalah suatu kondisi dimana komposisi jumlah penduduk yang berusia produktif lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berada pada rentang umur 15-64 tahun<sup>7</sup>.
- b. **Kompetensi Global**, yaitu suatu kondisi kemampuan negara untuk bersaing dengan negara lain di dunia yang dibuat dalam Laporan Daya Saing Global (*Global Competitiveness Report*) tahunan yang isinya menyoal kemampuan Negara-negara untuk menyediakan kemakmuran tingkat tinggi bagi warga negaranya<sup>8</sup>.
- c. **Persaingan Global (*global competitiv*)**, adalah sebuah bentuk kompetisi tingkat dunia dimana setiap negara berhak untuk ikut bersaing tanpa dibatasi oleh wilayah negara<sup>9</sup>.
- d. **Migrasi**, adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional). Dengan kata lain, migrasi diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah (negara) ke daerah (negara) lain. Arus migrasi ini

---

<sup>7</sup> <https://www.padamu.net/pengertian-bonus-demografi>. Diunduh tanggal 8 Juni 2020.

<sup>8</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan\\_Daya\\_Saing\\_Global](https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_Daya_Saing_Global). Diunduh tanggal 8 Juni 2020.

<sup>9</sup> <https://brainly.co.id/tugas/17516772>. Diunduh tanggal 8 Juni 2020

berlangsung sebagai tanggapan terhadap adanya perbedaan pendapatan antara kota dan desa<sup>10</sup>.

- e. **Sumber Daya Manusia (SDM)**, pengertian SDM dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian mikro dan makro. Pengertian SDM secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian SDM secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja<sup>11</sup>.
- f. **Sumber Daya Alam (SDA)**, adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong dalam SDA tidak hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air dan tanah<sup>12</sup>.
- g. Triple helix adalah sinergi dan penyatuan tiga kalangan yang terdiri dari kalangan akademik, usaha/industri dan pemerintah untuk mendorong pembangunan sosial dan ekonomi.



<sup>10</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Migrasi\\_manusia#:~:text=Migrasi%20manusia%20adalah%20perpindahan%20penduduk,%2Fnegara%20\(migrasi%20internasional\).](https://id.wikipedia.org/wiki/Migrasi_manusia#:~:text=Migrasi%20manusia%20adalah%20perpindahan%20penduduk,%2Fnegara%20(migrasi%20internasional).) Diunduh tanggal 8 Juni 2020.

<sup>11</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber\\_daya\\_manusia#:~:text=Sumber%20daya%20manusia%20\(SDM\)%20adalah,organisasi%2C%20baik%20institusi%20maupun%20perusahaan.&text=Pada%20hakikatnya%2C%20SDM%20berupa%20manusia,untuk%20mencapai%20tujuan%20organisasi%20itu.](https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_manusia#:~:text=Sumber%20daya%20manusia%20(SDM)%20adalah,organisasi%2C%20baik%20institusi%20maupun%20perusahaan.&text=Pada%20hakikatnya%2C%20SDM%20berupa%20manusia,untuk%20mencapai%20tujuan%20organisasi%20itu.) Diunduh tanggal 8 Juni 2020.

<sup>12</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber\\_daya\\_alam.](https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam.) Diunduh tanggal 8 Juni 2020.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **7. Umum.**

Kebijakan pemanfaatan Bonus demografi dalam meningkatkan daya saing bangsa untuk menghadapi kompetisi global, membutuhkan kerja keras yang melibatkan banyak pihak seperti institusi pendidikan, Balai Latihan Tenaga Kerja, dunia industri dan usaha (baik pemerintah maupun swasta), yang saling bersinergi dan berkolaborasi secara kuat, ketat dan berkelanjutan. Dengan demikian, kita bisa memanfaatkan kedatangan Bonus demografi dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan daya saing global.

Kebijakan pemanfaatan Bonus demografi dalam meningkatkan daya saing ini harus sejalan dengan landasan filosofis, landasan konstitusional dan peraturan terkait lainnya serta memiliki pendekatan teoritik yang jelas sehingga kebijakan ini memiliki landasan moral dan operasional yang sesuai dengan jiwa, semangat dan amanah konstitusi UUD NRI Tahun 1945 dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

#### **8. Peraturan Perundang-undangan.**

##### **a. UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.**

Sesuai dengan Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 pemerintah punya kewajiban terkait pengelolaan perkembangan penduduk dan keluarga yang diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan nasional untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan pemanfaatan bonus demografi dalam meningkatkan daya saing global merupakan bagian dari kewajiban pemerintah yang sejalan dengan kebijakan pengelolaan perkembangan penduduk dan keluarga, karena pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang semakin besar meniscayakan pemerintah untuk bisa memanfaatkannya dalam bentuk

meningkatkan kemampuan kualitas SDM sehingga bisa memiliki daya saing global.

Oleh sebab itu pemanfaatan bonus demografi ini juga bagian dari kewajiban pemerintah dalam mengatasi lonjakan jumlah penduduk yang semakin besar. Ada keterkaitan antara kebijakan pengelolaan kependudukan dengan kebijakan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM yang memiliki daya saing global, sehingga pemerintah bisa mengatasi dan memanfaatkan ledakan jumlah penduduk usia produktif dengan baik.

**b. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).**

Pada pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Fungsi dan tujuan pendidikan sebagaimana disebut di atas, sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang pemanfaatan bonus demografi dalam peningkatan daya saing karena menghadapi daya saing global diperlukan kemampuan SDM yang berkualitas, serta memiliki kemampuan inovasi dan kreatifitas tinggi. Disinilah perlunya pendidikan vokasi dikaitkan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, sehingga lulusannya bisa memenuhi kebutuhan pasar kerja.

**c. UU No. 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.**

UU ini memiliki korelasi dan relevansi dengan upaya pemanfaatan bonus demografi untuk meningkatkan daya saing global. Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa tujuan dari Sistem Nasional Penelitian dan

Pengembangan dan Penerapan Iptek adalah untuk memperkuat daya dukung Iptek bagi keperluan percepatan pencapaian tujuan negara, meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional.

Sedangkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian UU ini menegaskan bahwa Iptek bukan hanya sekedar untuk Iptek, tapi harus bisa membantu mewujudkan tujuan negara dalam meningkatkan daya saing bangsa.

d. **Perpres No. 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024.**

Dalam Perpres No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 pada lampiran rancangan teknokratik Bab 4, Meningkatkan SDM berkualitas dan Berdaya Saing, untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing, pemerintah merumuskan kebijakan antara lain:

**Pertama;** Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri. Kebijakan ini dilakukan melalui program penyelerasan bidang studi keahlian dan program pembelajaran inovatif, pengembangan standar kompetensi dan penyelerasan kurikulum, penyelerasan pola pembelajaran, pengembangan sistem insentif dan regulasi untuk mendorong dunia industri dan usaha dalam pendidikan serta pelatihan vokasi.

**Kedua;** Penguatan Pendidikan Tinggi berkualitas melalui pengembangan PT sebagai pusat Iptek inovasi dan pusat keunggulan (*center of excellence*), kerjasama PT dengan dunia industri dan pemerintah, peningkatan kualitas pemanfaatan hasil penelitian PT untuk kepentingan dunia industri, pengembangan prodi yang adaptif dan desain kurikulum yang sesuai kebutuhan dunia kerja, pengembangan

dana abadi Perguruan Tinggi yang bersumber dari masyarakat dan swasta melalui program filantropi untuk pengembangan kebutuhan pendidikan tinggi, diferensiasi misi dalam fokus pengembangan Tridharma PT yaitu kampus sebagai pusat penelitian (*research university*), kampus sebagai kegiatan pengajaran (*teaching university*) dan kampus sebagai pusat pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja (*vocational university*).

**Ketiga;** Peningkatan kapabilitas lptek dan penciptaan inovasi yang mencakup pemanfaatan hasil lptek dan inovasi dengan fokus sesuai Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045, prioritas riset nasional untuk menghasilkan produk riset strategis, pemetaan potensi SDA dan SDB (sumber daya buatan) dengan pendekatan multidisiplin, inovasi teknologi untuk peningkatan SDA yang berkelanjutan, penerapan teknologi untuk pencegahan bencana dan mitigasi pasca bencana<sup>13</sup>.

**e. Permenakertrans No. 35 tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.**

Permenakertrans ini mengatur tentang rasionalisasi 1;10 yaitu satu orang tenaga kerja asing berbanding sepuluh orang tenaga kerja lokal. Artinya sebuah perusahaan yang merekrut satu tenaga kerja asing, maka dia harus mempekerjakan sepuluh orang tenaga kerja lokal perusahaan yang sama, kecuali untuk beberapa posisi tertentu untuk pekerjaan yang sifatnya darurat dan mendesak. Dalam peraturan ini juga diatur larangan untuk mempekerjakan orang asing pada posisi komisaris untuk PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri).

**9. Kerangka Teoretis.**

Kajian teori yang digunakan terkait pemanfaatan bonus demografi dalam meningkatkan daya saing yaitu Teori Kependudukan dari Thomas Robert Malthus yang terkenal dengan nama *Malthusian Trap* (Jebakan Malthus) dan

<sup>13</sup> Perpres No 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan lampiran Buku Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, Bappenas. Hal 108-110

Teori *Knowledge Based Economic* (KBE) atau ekonomi berbasis pengetahuan sebagai bagian dari inovasi dan peningkatan daya saing.

**a. Malthusian Trap (Jebakan Malthus).**

Teori ini dikembangkan oleh Thomas Robert Malthus dalam bukunya *Essays Principle Of Population*. Terbit pertama kali tahun 1798, teori ini menyatakan bahwa jumlah penduduk tumbuh lebih cepat daripada bahan makanan. Alasannya karena jumlah penduduk berkembang meningkat mengikuti deret ukur (geometris), sementara makanan tumbuh meningkat mengikuti deret hitung (arismatik). Oleh sebab itu, menurut Malthus suatu saat akan terjadi kegoncangan dimana jumlah penduduk tumbuh berkembang sangat cepat sementara ketersediaan jumlah makanan sangat terbatas<sup>14</sup>.

Menurut Malthus, jumlah penduduk akan terus bertambah banyak bila sarana kehidupan terus meningkat kecuali ada hambatan tertentu yang bisa berpengaruh terhadap kehidupan. Hambatan tertentu itu menurut Malthus terbagi dua, yaitu hambatan yang bisa mencegah (*preventif check*) dan hambatan positif (*positive check*) yang terjadi pada kelompok manusia. Hambatan pencegahan yang masih dalam kontrol manusia, bisa dilakukan melalui penundaan perkawinan, menunda kehamilan, mencegah nafsu dan pantangan kawin. Sedangkan hambatan positif (*positive cheks*) merupakan faktor pengontrol diluar kendali manusia seperti peperangan, bencana alam, kejahatan kemanusiaan (*genocida*) dan wabah penyakit.

Bagi Malthus, pertumbuhan penduduk merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Malthus dalam buku keduanya *Progress of Wealth* mengajukan beberapa saran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu melalui faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi menjelaskan

---

<sup>14</sup> Thomas Malthus, 1826, *an essay the principle of population* , John Murray, London. Juga bisa dilihat makalah lainnya Working Paper, *The Malthusian Trap and Development in PreIndustrial Societies: A View Differing from the Standard One* by Clem Tisdell And Serge Svizzero January 2015, The University of Quensland.

bahwa pertumbuhan ekonomi akan terjadi jika pertumbuhan berimbang dan meningkatkan permintaan efektif. Pertumbuhan berimbang terjadi dimana ekonomi dibagi dua sektor, pertanian dan industri. Kemajuan teknologi pada kedua sektor itulah yang akan membawa kemajuan pembangunan ekonomi. Sedangkan meningkatkan permintaan efektif bisa dilakukan dengan beberapa langkah diantaranya distribusi kepemilikan tanah secara adil, memperluas perdagangan internal dan eksternal, peningkatan konsumsi tidak produktif dan peningkatan kesempatan kerja melalui rencana pekerjaan umum.

Adapun faktor non ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan berbagai cara diantaranya yaitu meningkatkan standar pendidikan yang berkualitas, standar moral, etos kerja, administrasi yang baik serta penegakan hukum yang tegas dan efisien.

Kedua faktor tersebut (ekonomi dan non ekonomi) bisa menjadi *trigger* yang mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga bisa berdampak terhadap peningkatan jumlah penduduk. Jadi dalam pandangan Malthus, pertambahan penduduk itu akibat bukan sebab, penyebabnya adalah kemajuan pembangunan ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

**b. Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge Based Economy*) dan Daya Saing.**

Ekonomi berbasis pengetahuan adalah proses pembangunan ekonomi yang berdasarkan produksi, distribusi dan aplikasi dari pengetahuan. Gagasan ekonomi berbasis pengetahuan pertama kali dimunculkan oleh seorang pakar manajemen Peter F. Drucker, dalam bukunya *The Age of Discontinuity: Guidelines to Out Changing Society* bahwa penguasaan informasi dan ilmu pengetahuan akan menjadi kunci utama keberhasilan ekonomi di masa depan<sup>15</sup>. Menurut Drucker, aset

<sup>15</sup> Peter Drucker, 1992. *The Age of Discontinuity; Guideliness to our Changing Society*. London, Heineman.

perusahaan yang paling berharga di abad 21 adalah pengetahuan karena pengetahuan inilah yang bisa dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, dalam abad 21, sumber daya ekonomi dalam artian sarana produksi, bukanlah modal kapital atau modal Sumber Daya Alam ataupun modal pekerja. Tapi sumber daya ekonomi yang paling dasar adalah pengetahuan<sup>16</sup>. Hal ini karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu mempengaruhi manusia dalam cara berpikir, berkembang, berkreasi dan berinovasi. Informasi dan pengetahuan tersebut akan bisa menjadi modal dasar bagi pengembangan ekonomi modern di masa depan, yang bisa mempengaruhi proses kerja, perilaku tenaga kerja dan perilaku konsumsi (*behaviour consumption*).

Menurut Bank Dunia, ekonomi berbasis pengetahuan merupakan model ekonomi yang menstimulasi kreatifitas, kreasi, serta penerapan pengetahuan dan informasi untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan. Oleh sebab itu, ada 4 (empat) pilar penting dalam pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan yaitu **pertama**, kerangka institusi atau organisasi serta insentif ekonomi yang menghasilkan efisiensi dalam pemanfaatan pengetahuan dan pengembangan kewirausahaan, **kedua**, masyarakat yang terdidik dan terlatih yang mampu menciptakan, berbagi dan memanfaatkan pengetahuan, **ketiga**, sistem infrastruktur teknologi dan inovasi yang efisien bagi perusahaan, pusat penelitian, universitas, konsultan dan organisasi lain dalam hal penciptaan teknologi baru sehingga mampu bersaing dalam lingkungan global dan **keempat** teknologi informasi yang mampu memfasilitasi karya kreatif serta pengembangan dan cara melakukan proses informasi<sup>17</sup>.

Menurut Zuhail, ekonomi berbasis pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*) Sumber Daya Alam (SDA) melalui penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai Iptek.

---

<sup>16</sup> Peter Drucker, 1983, *The Post Capital Society*, SageBook, Comp

<sup>17</sup> World Bank, 2012. *Knowledge Assesment Methodology*.

Dalam ekonomi berbasis pengetahuan, keberadaan SDA bisa menjadi sumber daya saing bila mendapat sentuhan lptek mutakhir<sup>18</sup>.

Sedangkan daya saing sendiri, menurut Zuhail merupakan sebuah sistem berpikir (*system of thinking*) yang berkaitan dengan penguasaan aspek pengetahuan (*knowledge*) dan inovasi dalam suatu era baru yang bermunculan dalam sebuah kompetisi global. Sebuah keunggulan komparatif (*comparative advantage*) apabila mendapat sentuhan pengetahuan teknologi dan keahlian akan menjadi keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) untuk bisa bersaing di masa depan<sup>19</sup>.

Indonesia, menurut Zuhail punya modal untuk bisa menciptakan SDM yang berdaya saing, yaitu **pertama**, modal alam dan lingkungan. Modal alam berupa Sumber Daya Alam dan kualitas lingkungan yang terjaga untuk pembangunan yang berkelanjutan. **Kedua**, modal budaya yaitu kemampuan kita untuk mengembangkan budaya sendiri dan menyaring atau merelokalisasi budaya global. **Ketiga**, modal sosial berupa kepercayaan dan solidaritas sosial. **Keempat**, modal infrastruktur seperti infrastruktur pendidikan, kesehatan dan perekonomian rakyat. **Kelima**, modal manusia berupa kemampuan individu untuk berinisiatif dan berkreasi mengembangkan inovasi dan hal-hal baru terkait kewirausahaan<sup>20</sup>.

## 10. Data dan Fakta.

### a. Menurunnya Tingkat Produktifitas dan Daya Saing Bangsa.

Produktifitas dan daya saing bangsa Indonesia masih sangat rendah dibandingkan negara-negara lain yang setara di dunia. Berdasarkan data *Global Capital Human Index* yang dirilis oleh *World Economic Forum* (WEF) tahun 2017, dijelaskan bahwa SDM Indonesia berada pada urutan ke-65 dari 130 negara yang di survei. SDM Indonesia tertinggal dibandingkan Malaysia (peringkat 33), Thailand

<sup>18</sup> Zuhail, 2008. Kekuatan Daya Saing Indonesia. Jakarta, Kompas

<sup>19</sup> Zuhail, 2010. Knowledge and Innovation, Jakarta, Gramedia.

<sup>20</sup> Zuhail 2008. Kekuatan Daya Saing Indonesia. Jakarta, Kompas.

(peringkat 40) dan Vietnam (64). Selain itu pertumbuhan PDB (*Product Domestic Bruto*) Indonesia sebesar 4,9 % pada tahun 2017, hanya 0,9% yang bersumber dari *Total Faktor Productivity* (TFP), sedangkan sisanya 2,8 % berasal pertumbuhan ekonomi dari modal capital, dan 1.5% berasal dari modal manusia.

Dari sisi tenaga kerja yang terampil, kreatif, inovatif dan adaptif masih belum bisa terpenuhi secara maksimal. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2019, jumlah pekerja yang memiliki keahlian menengah dan tinggi hanya 39,57% lebih rendah dari negara-negara ASEAN. Mayoritas lulusan sekolah pekerja masih di dominasi lulusan SD dan SMP yaitu 35,29%. Lulusan SMA dan kejuruan yaitu 55,28 % atau sebesar 72,88 juta orang. Sedangkan angka pengangguran lulusan pendidikan menengah dan tinggi sebanyak 8,88%<sup>21</sup>.

Dari sisi kapasitas adopsi Iptek dan penciptaan inovasi, Indonesia masih rendah. Indonesia berada di peringkat 85 dari 126 negara dengan skor *Global Innovation Index* (GII) 29,8 dari skala 0-100 (2019), atau peringkat 14 dari 15 negara-negara Asia Tenggara dan Oceania<sup>22</sup>. Hal ini disebabkan oleh masih belum memadainya infrastruktur litbang. Jumlah SDM Iptek masih terbatas dan hanya 14,08 % diantaranya yang berkualifikasi S3. Ekosistem inovasi belum sepenuhnya tercipta sehingga proses hilirisasi dan komersialisasi hasil litbang terhambat. Kolaborasi triple helix belum didukung oleh kapasitas perguruan tinggi yang memadai sebagai sumber inovasi teknologi (*center of excellence*).

**b. Masih Lemahnya Inovasi Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Produktifitas Ekonomi Berbasis Inovasi Teknologi.**

Perguruan Tinggi belum fokus dalam mengembangkan bidang ilmu yang menjadi keunggulan dan masih kurang terhubung dengan jejaring

---

<sup>21</sup> Lihat SAKERNAS 2019 dalam BOOKLET AGUSTUS 2019 diterbitkan oleh BPS. Hal 18

<sup>22</sup> Lihat Global Inovation Index 2019 yang dikeluarkan World Intellectual Property Organization (WIPO)

kerjasama riset, baik antara Perguruan Tinggi dan pusat-pusat penelitian di dalam maupun luar negeri. Berdasarkan data Scimago, sejak 1966-2014 jumlah publikasi global Indonesia mencapai 32.335 publikasi. Dari data tersebut memperlihatkan posisi Indonesia masih dibawah Malaysia, Singapura dan Thailand atau urutan ke-4 untuk tingkat ASEAN. Dan urutan ke-57 untuk peringkat dunia.

Dari sisi kontribusi riset dan jumlah paten yang dihasilkan, sampai 2015, jumlah paten yang terdaftar pada kantor paten Amerika hanya 312 paten. Jauh lebih kecil dibandingkan Malaysia, Singapura dan Thailand. Untuk nilai paten yang terdaftar di kantor paten beberapa negara ASEAN, berdasarkan data WIPO 2015, nilainya 4.82 juta US\$ atau urutan 43 paten dunia dan urutan 4 paten tingkat ASEAN<sup>23</sup>.

**c. Masih Rendahnya Kualitas SDM.**

Ukuran kualitas SDM salah satunya ditentukan oleh kualitas pendidikan. Berdasarkan data PISA (*Programme for International Student Assessment*) tahun 2019 yang dibuat oleh OECD (*Organisation Economic Cooperation Development*) atau Organisasi Kerjasama Pembangunan dan Ekonomi yang menilai kemampuan membaca, matematika dan sains, Indonesia menempati urutan ke-72 dari 77 negara yang di survei, lebih rendah dan tertinggal dari pada Brunei dan Malaysia<sup>24</sup>.

Rendahnya kualitas SDM juga diperparah oleh pendeknya masa anak-anak bersekolah. Menurut data statistik pendidikan, sampai tahun 2018 lama rata-rata sekolah anak Indonesia hanya 8,58 tahun atau setara kelas 2 SMP, yang berarti tidak sesuai dengan target Kemendikbud yaitu 8,7 tahun<sup>25</sup> atau tidak sesuai dengan Target RPJMN 2015-2019 yaitu rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun keatas adalah 8,8 tahun.

<sup>23</sup> Renstra Ristek Dikti 2015-2019, diterbitkan Kemenristek Dikti. hal. 17-19

<sup>24</sup> Sumber; <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-50648395>. Diunduh tanggal 11 Juni 2020.

<sup>25</sup> Rangkuman Statistik Pendidikan Dasar dan Menengah 2017-2018, Pusat Data Statistik Pendidikan, Kemendikbud.

## 11. Lingkungan Strategis.

### a. Global.

Situasi lingkungan global sekarang sedang dalam wabah Pandemi Covid-19, virus yang diprediksi berasal dari Wuhan China sejak akhir 2019. Dunia sedang mengalami ketakutan karena sebaran virus corona, hampir tidak ada satupun negara di dunia yang bebas virus corona. Berdasarkan data laporan WHO, sampai sekarang jumlah orang yang terinfeksi virus corona mencapai 22.256.200 dengan jumlah orang yang meninggal 782.456 orang<sup>26</sup>.

Wabah pandemi global Covid-19 tidak hanya berdampak terhadap kesehatan, tapi juga mempengaruhi perekonomian dunia. Menurut IMF, akibat virus corona, proyeksi pertumbuhan ekonomi global mengalami kerugian sebesar 12 triliun Dollar US atau sekitar 168 ribu triliun rupiah. IMF juga memperkirakan akibat Covid-19 pertumbuhan ekonomi global mengalami kontraksi pelambatan sebesar 4,9%<sup>27</sup>.

Dampak Covid-19 dilingkup global, menghambat kemajuan revolusi industri 4.0 terbukti semakin meningkatnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena banyaknya pekerjaan yang digantikan oleh teknologi. Menurut laporan Mc Kinsey Global Institute, diperkirakan 800 juta pekerja akan kehilangan pekerjaan di tahun 2030 seiring dengan datangnya bonus demografi. Sementara itu laporan World Economic Forum (WEF) pernah merilis Future of Job Report 2018 yang menyebutkan bahwa akan banyak beberapa pekerjaan yang hilang dan digantikan dengan profesi baru di tahun 2022. Beberapa pekerjaan seperti tenaga data analis, akuntan dan kasir akan hilang digantikan oleh *Artificial Intelligence, machine learning specialist, big data* dan lainnya.

<sup>26</sup> Data laporan WHO sampai 20 agustus 2020 seperti dirilis dalam website <https://covid19.who.int/>. Diunduh tanggal 11 Juni 2020.

<sup>27</sup> <https://money.kompas.com/read/2020/06/25/125033526/imf-covid-19-sebabkan-perekonomian-global-rugi-rp-168000-triliun>. Diunduh tanggal 11 Juni 2020.

**b. Regional.**

Keterlibatan Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas ASEAN bersama China dalam AFTA (*ASEAN Free Trade Area*), *Trans Pacific Partnership* (TPP), serta integrasi ekonomi negara-negara ASEAN dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara kawasan. Untuk mewujudkan hal tersebut, ada 4 pilar yang harus dibangun yaitu ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, kawasan perekonomian yang kompetitif (kualitas barang, harga dan tenaga kerja yang kompetitif), integrasi ekonomi kawasan ke dalam ekonomi global, serta pembangunan ekonomi yang merata.

Keterlibatan Indonesia dalam MEA turut mempengaruhi pemanfaatan bonus demografi dimana Indonesia harus membuka diri terhadap produk-produk luar dan tenaga kerja luar yang masuk ke Indonesia tanpa ada hambatan yang mengakibatkan produk-produk impor pertanian lebih murah dan berkualitas daripada produk lokal. Demikian juga dengan masuknya tenaga kerja asing dari China sebagai akibat dari AFTA, membuat banyak sektor pekerjaan yang seharusnya bisa dikerjakan oleh tenaga kerja lokal, harus bersaing dengan tenaga kerja impor.

Dalam konteks regional ASEAN bersama dengan Jepang, Korea dan China sepakat menandatangani kesepakatan untuk mengkampanyekan Green Job, yaitu sebuah kesepakatan untuk menciptakan lapangan kerja dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Hal ini berarti bahwa lapangan kerja tidak sekedar berorientasi kepada ekonomi, tapi juga harus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Para menteri negara ASEAN juga sepakat perlunya tiga pilar (sosial budaya, politik keamanan dan ekonomi) dalam kerjasama ASEAN. Pilar sosial budaya termasuk di dalamnya masalah ketenagakerjaan menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling banyak penduduknya, paling beragam kekayaan budayanya, serta memiliki SDM yang besar dengan usia produktif yang terus meningkat.

**c. Nasional.**

## 1) Politik.

Situasi politik nasional yang terjadi ditengah Covid-19 adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Berdasarkan data dari KPU, Pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan di 270 daerah yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 akan berpengaruh terhadap kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan bonus demografi, karena seringkali isu bonus demografi menjadi isu krusial bagi calon Kepala Daerah untuk mendongkrak elektabilitas melalui program-program populis seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja, kesejahteraan sosial dan lain sebagainya.

## 2) Ekonomi.

Wabah pandemi global Covid-19 tidak hanya berdampak terhadap kesehatan berupa jatuhnya korban meninggal dunia dan ribuan orang positif terinfeksi, tapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian global yaitu potensi terjadinya resesi dan krisis ekonomi dunia. Beberapa negara seperti Singapura, Korea Selatan, Hongkong, Jepang dan Jerman juga mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi dengan penyusutan minus 3-5%.

Pemerintah sudah mencoba mengerahkan segala daya upaya untuk bisa menyelamatkan Indonesia dari jurang resesi ekonomi dan krisis global. UU No. 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penangan Covid-19 menganggarkan kurang lebih 900 triliun untuk mengatasi dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional, serta Perpres No. 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Perpres ini mengupayakan jalan tengah dalam mengatasi Covid-19 dengan

tetap mengatasi dampak kesehatan sekaligus mendorong pemulihan ekonomi nasional. Diharapkan kedua regulasi ini bisa menjadi payung hukum bagi lintas sektoral untuk mengambil langkah-langkah *ekstraordinary* menghadapi wabah Covid-19 dan dampaknya terhadap ekonomi nasional.

### 3) Sosial Budaya.

Beberapa norma dan nilai sosial budaya yang berkembang di masyarakat sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan bonus demografi dalam meningkatkan kualitas SDM, skill keterampilan, etos kerja dan sebaran penduduk berkualitas. Beberapa pandangan hidup yang berkembang di masyarakat seperti "*Mangan ora mangan sing penting kumpul* (makan tidak makan yang penting tetap bersama), *urip mung mampir ngombe dan kerjo ora usah ngoyo* (hidup hanya sementara, tidak perlu kerja keras mengejar dunia)". Nilai-nilai sosial dan norma tersebut kemudian mempengaruhi etos kerja masyarakat sehingga kurang bisa bersaing di tingkat global.



## BAB III

### PEMBAHASAN

#### 12. Umum.

Bab ini merupakan Bab inti dari Taskap yang isinya menjawab tiga pertanyaan kajian seperti dijelaskan dalam Bab I. Analisis ini menjawab rumusan masalah dengan menggunakan kerangka teori, aspek perundang-undangan, data dan fakta serta memperhatikan lingkungan strategis sebagai landasan analisis. Diharapkan dari pendekatan analisis tersebut, bisa ditemukan satu *output* rumusan solusi dalam mengatasi ketiga masalah.

Ketiga pertanyaan kajian yang secara umum meliputi bagaimana kesiapan pemerintah dalam menghadapi bonus demografi, bagaimana kondisi daya saing SDM Indonesia dalam persaingan global dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam memanfaatkan bonus demografi untuk meningkatkan persaingan global akan dibahas secara rinci dalam Bab ini.

#### 13. Kesiapan Pemerintah Menghadapi Bonus Demografi.

##### a. Grand Design dan *Roadmap* Pembangunan Kependudukan dan Implementasinya.

Terkait kesiapan pemerintah menghadapi bonus demografi, pada periode akhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 153 tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) 2011-2035. GDPK ini secara umum bertujuan untuk mencapai kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa. Secara khusus, GDPK bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang, mewujudkan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan memiliki etos kerja tinggi, mewujudkan keluarga Indonesia yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmoni, mewujudkan keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung

alam dan daya tampung lingkungan, serta mewujudkan administrasi kependudukan yang tertib, akurat dan dapat dipercaya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ada lima strategi dalam GDPK yang dilakukan yaitu:

- 1) Pengendalian kuantitas penduduk melalui pengaturan fertilitas (kelahiran) lewat program Keluarga Berencana dan pembudayaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera. Pengendalian kuantitas penduduk juga dilakukan melalui penurunan mortalitas (kematian) dengan cara penurunan kematian ibu hamil, kematian ibu melahirkan, kematian ibu pasca melahirkan dan kematian ibu dan anak.
- 2) Peningkatan kualitas penduduk dibidang kesehatan, pendidikan, agama, ekonomi dan sosial budaya melalui:
  - a) Kualitas kesehatan dengan cara menurunkan angka kematian dan meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan asupan nutrisi gizi dan akses ketersediaan pangan, meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
  - b) Kualitas pendidikan melalui peningkatan akses layanan pendidikan, peningkatan kompetensi penduduk melalui pendidikan formal dan non formal, pengurangan kesenjangan pendidikan khususnya untuk anak perempuan dengan meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan.
  - c) Kualitas ekonomi melalui peningkatan status ekonomi penduduk dengan memperluas kesempatan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan mengurangi kesenjangan ekonomi untuk menurunkan kemiskinan.
- 3) Pembangunan keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmoni. Dilakukan melalui pembangunan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan perkawinan yang sah, berwawasan nasional yang berkontribusi kepada masyarakat

bangsa dan negara, serta mampu merencanakan sumber daya keluarga.

- 4) Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk. Dilakukan melalui pengelolaan urbanisasi, pengarahannya sebaran penduduk sesuai kebutuhan tiap wilayah, mencegah faktor yang menyebabkan terjadinya perpindahan paksa dan melindungi TKI yang bekerja di luar negeri secara maksimal.
- 5) Penataan administrasi kependudukan. Dilakukan melalui pengelolaan dan penataan data base kependudukan dan penataan penerbitan dokumen kependudukan.

Adapun *Roadmap* (Peta Jalan) untuk pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1

**ROADMAP GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN  
2011-2035**

Strategi	Kegiatan	Target capaian				
		2015	2020	2025	2030	2035
Pengendalian kuantitas penduduk	Jumlah penduduk (juta)	253,6	267,8	280,9	292,8	303,1
	Laju pertumbuhan penduduk (%)	1,27	1,12	0,98	0,85	0,71
	Angka fertilitas total	2,18	2,10	2,04	1,99	1,97
Peningkatan Kualitas penduduk	Meningkatkan rata rata lama sekolah	6,5	7,2	7,9	8,8	9,8
	Meningkatkan Angka Partisipasi Murni SMA (APM)	50,7	56,6	63,1	70,4	78,5
	Meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH)	71,5	74,2	77,0	80,0	83,0
	Meningkatkan Pendapatan Percapita atau (Gross Nasional Income)	4,421	5,002	5,900	6,959	8,209
Pembangunan Keluarga	Keluarga berdasarkan perkawinan sah dan beriman bertakwa kepada Tuhan YME	Xxxxx	Xxxxx	Xxxxx	xxxxx	xxxxx
	Keluarga sehat sejahtera maju mandiri dengan anak ideal dalam keharmonisan berkeadilan dan kesetaraan gender	Xxxxx	Xxxxx	Xxxxx	Xxxxx	Xxxxx
	Keluarga berketahanan sosial, memiliki perencanaan sumber daya keluarga, berwawasan nasional dan berkontribusi masyarakat bangsa dan negara	Xxxxx	Xxxxx	Xxxxx	Xxxxx	Xxxxx
Pengarahannya Mobilitas Penduduk	Pembangunan kawasan perdesaan menjadi sistem produksi pertanian	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxx	xxxx
	Peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah	xxx	xxx	xx	xx	x

	Peningkatan layanan investasi	xxx	xxx	xx	x	X
	Pengembangan usaha berbasis komoditas unggulan	xxxxx	xxxx	xxxx	xxx	Xxx
	Peningkatan kualitas SDM dg prioritas penduduk lokal untuk jadi wirausaha handal dan kompeten	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxx	xxxx
	Pemodelan rekayasa sosial integrasi penduduk lokal dan pendatang	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxx	Xxxx
	Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	xxx	xxx	xx	xx	xx
	Peningkatan infrastruktur intra dan antar wilayah	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxx	xxxx
	Pengarahan gerak keruangan penduduk untuk perencanaan tata ruang dan penggunaan lahan yang lestari	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxx	xxxx
	Pengarahan gerak keruangan penduduk yang terpaksa pindah	xxxx	xxxxxx	xxxxx	xxxxx	Xxxxx
	Review menyeluruh dampak positif negative kebijakan migrasi internasional yang terintegrasi dengan paket liberalisasi perdagangan bebas (FTA)	xxx	xxx	xx	x	X
	Penyiapan SDM kompeten dan berstandar internasional	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxx	xxxx
	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	xxx	xx	xx	xx	xx
	Penguatan peran dan kapasitas elemen masyarakat sipil (CSO) dalam pengembangan pemodelan kebijakan pengarahannya penduduk	xxx	xx	xx	xx	Xx
Pembangunan sistem data informasi kependudukan	Konsolidasi tertib administrasi kependudukan	xxxxx	xxxx	xxx	xx	Xx
	Pelayanan prima administrasi kependudukan	xxxx	xxxxx	xxxx	xxx	Xx
	Pengembangan masyarakat berbasis pengetahuan ( <i>knowledge based society</i> )	xxx	xxxx	xxxxx	xxxx	Xxx
	Integrasi data dan informasi kependudukan	xxx	xxxx	xxxx	xxxxx	Xxx
	Peningkatan pendayagunaan data dan informasi kependudukan sebagai DSS ( <i>Decision Support System</i> )	xxx	xxxx	xxxx	xxxxx	Xxxxx

Sumber; Buku 1 Grand Design Pembangunan Kependudukan 2011-2035 Hal 27-32

*Grand Design* dan *Roadmap* ini diharapkan bisa menjadi panduan dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota serta mengintegrasikannya ke dalam dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian akan terjadi sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan kependudukan yang dikaitkan dengan pembangunan pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan ketenagakerjaan.

Dari sisi pencapaian, realisasi pengendalian jumlah penduduk lebih besar daripada jumlah yang ditargetkan yaitu 267,8 juta yang ditargetkan, terealisasi 268,5 juta. Hal ini memperlihatkan bahwa kita mengalami kelebihan jumlah penduduk dari target yang direncanakan, dengan jumlah angka kelahiran lebih tinggi dari yang direncanakan. Sedangkan untuk peningkatan kualitas penduduk, secara kuantitas sudah cukup baik dan mencapai target yang diharapkan bahkan lebih kecuali untuk kegiatan peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) dimana terjadi penurunan dari usia 74,2 yang diharapkan, terealisasi cuma 71,2. Demikian juga dengan pendapatan perkapita dari 5,002 U\$, baru terealisasi sebesar 4,160 U\$. (lihat tabel)

**Tabel 2**  
**Realisasi Pencapaian *Roadmap***

**Bidang Pengendalian Kuantitas dan Peningkatan Kualitas Penduduk**

Strategi	Kegiatan	Pencapaian 2020	
		Target	Realisasi
Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah penduduk (juta)	267,8	268,5
	Laju pertumbuhan penduduk (%)	1,12	1,1
	Angka fertilitas total	2,10	2,32
Peningkatan Kualitas Penduduk	Meningkatkan rata-rata lama sekolah	7,2	8,17
	Meningkatkan Angka Partisipasi Murni SMA (APM)	56,6	60,70
	Meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH)	74,2	71,2
	Meningkatkan Pendapatan Perkapita Nasional ( <i>Gross Nasional Income</i> )	5,002	4,160

Sumber data: Diolah dari Laporan BPS (Badan Pusat Statistik) 2019

Kalau kita perhatikan realisasi pencapaian dari *Roadmap* terkait strategi pengendalian kuantitas penduduk, maka ada realisasi yang tidak sesuai target terkait pengendalian jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk dan total angka kelahiran (*total fertility rate*). Dalam situasi

wabah pandemi Covid-19, ada beberapa penyebab kurang tercapainya *Roadmap* pengendalian kuantitas penduduk, yaitu:

- 1) Kurang maksimalnya program pengendalian jumlah penduduk melalui Keluarga Berencana. Ditengah situasi Covid-19 yang mendorong orang untuk kerja dirumah, ibadah di rumah dan belajar dirumah, memiliki dampak terhadap kondisi demografi kependudukan kita. Covid-19 justru berdampak terhadap penambahan jumlah penduduk Indonesia dengan jumlah kehamilan meningkat sebanyak 400.000 selama terjadinya wabah pandemi<sup>28</sup>, sedangkan angka perceraian terus meningkat sampai 88% selama masa pandemi karena faktor ekonomi yang turun<sup>29</sup>. Faktor kehamilan dan perceraian ikut mempengaruhi kualitas jumlah penduduk Indonesia selama Covid-19.
- 2) Sebaran penduduk yang tidak merata. Jumlah penduduk Indonesia mencapai kurang lebih 269 juta jiwa, dimana menurut data BPS 2011, sebanyak 57% jumlah penduduk tersebar di Pulau Jawa dengan provinsi paling banyak penduduknya adalah Jawa Barat<sup>30</sup>. Sebaran penduduk yang tidak merata berdampak terhadap kondisi demografi kita dimana Propinsi Jawa mengalami penyempitan areal lahan sawah, sehingga kekurangan produksi pangan, kelebihan jumlah tenaga kerja yang semakin meningkat sehingga menambah angka pengangguran, menurunnya kualitas kehidupan penduduk karena fasilitas yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup yang semakin banyak.
- 3) Kurangnya kesadaran dan kepedulian Kepala Daerah (*awareness*) terhadap Program Pengendalian Jumlah Penduduk. Masih banyak kepala daerah yang menganggap KB bukan sebagai prioritas program. Upaya pemerintah untuk menekan tingkat kesuburan dan

---

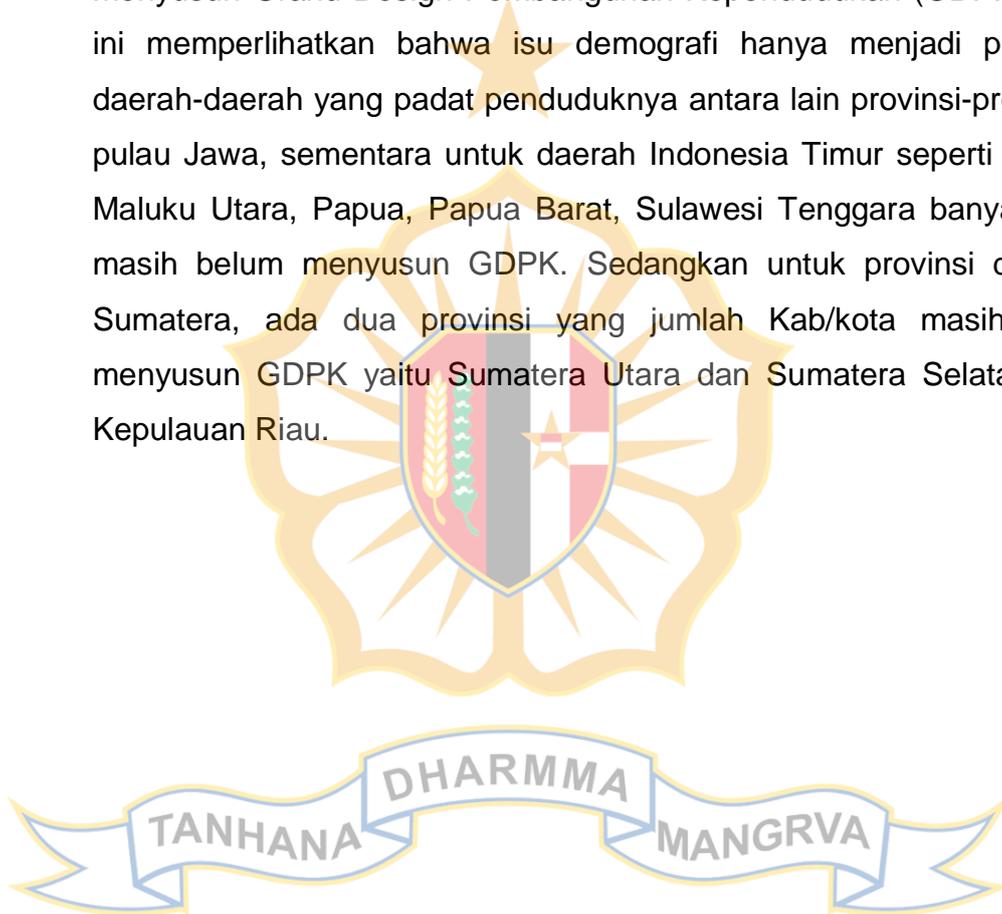
<sup>28</sup> <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/20/110300923/lebih-dari-400.000-kehamilan-baru-terjadi-selama-pandemi-di-indonesia>. Diunduh tanggal 6 Agustus 2020.

<sup>29</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200624103600-20-516800/perceraian-di-semarang-naik-3-kali-lipat-selama-wabah-corona>. Diunduh tanggal 6 Agustus 2020.

<sup>30</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/23/183000269/persebaran-penduduk-indonesia?page=all>. Diunduh tanggal 6 Agustus 2020.

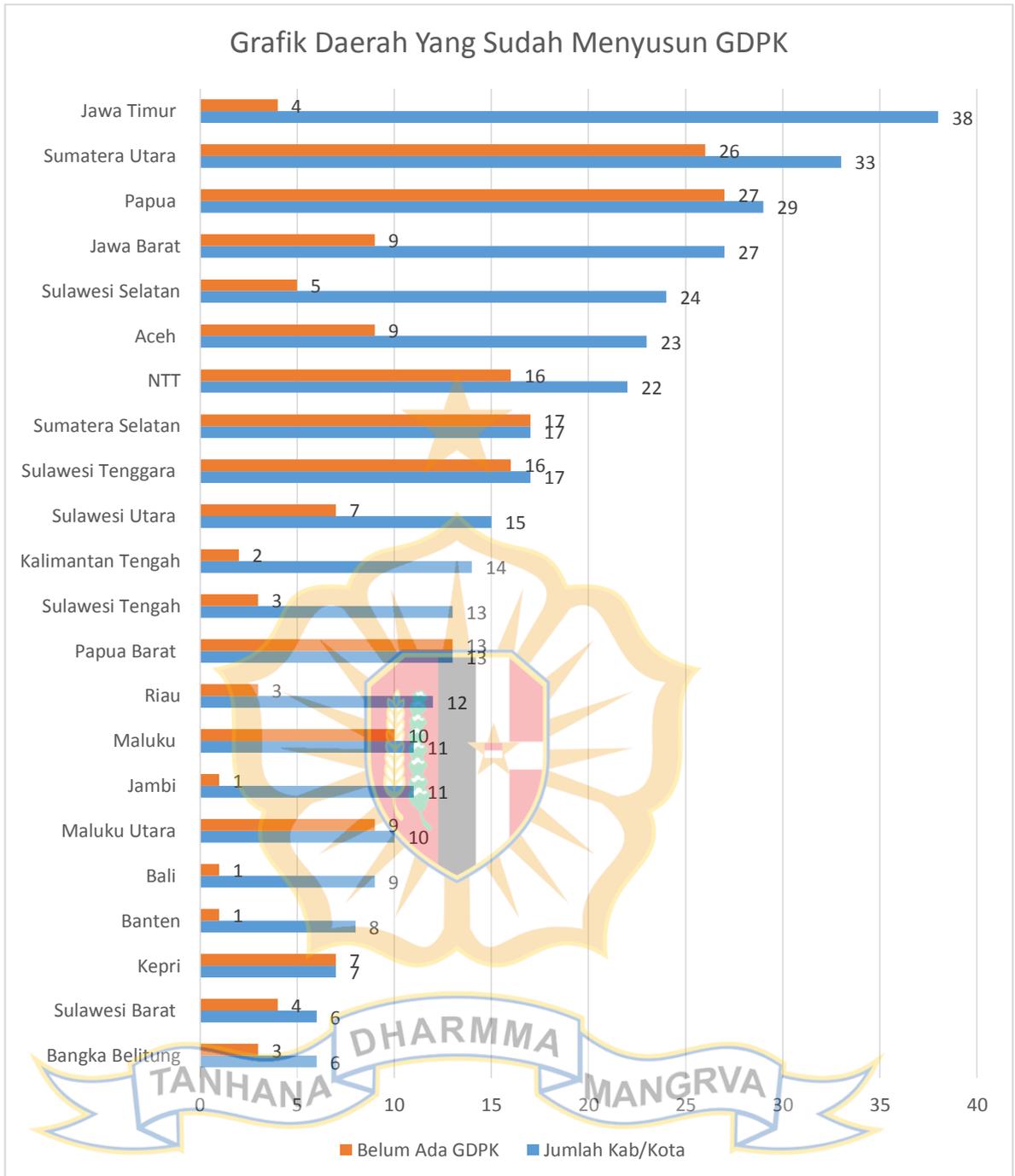
mengendalikan jumlah penduduk akan sia-sia tanpa dukungan 514 kepala daerah se-Indonesia.

Sejak pertama kali di luncurkan tahun 2014, implementasi pelaksanaan *Grand Design* dan *Roadmap* Pembangunan Kependudukan masih belum terlaksana secara maksimal. Berdasarkan data dari Kemendagri, sampai pertengahan 2020, dari 514 Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia, masih ada 193 Kabupaten/Kota yang belum menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)<sup>31</sup>. Hal ini memperlihatkan bahwa isu demografi hanya menjadi perhatian daerah-daerah yang padat penduduknya antara lain provinsi-provinsi di pulau Jawa, sementara untuk daerah Indonesia Timur seperti Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tenggara banyak yang masih belum menyusun GDPK. Sedangkan untuk provinsi di Pulau Sumatera, ada dua provinsi yang jumlah Kab/kota masih belum menyusun GDPK yaitu Sumatera Utara dan Sumatera Selatan serta Kepulauan Riau.



---

<sup>31</sup> Surat Menteri Dalam Negeri No 470/3376/SJ tanggal 20 Juni 2020 tentang Evaluasi Grand Design Pembangunan Kependudukan Daerah



Dari GDPK yang sudah disusun baik oleh Provinsi maupun Kabupaten/Kota, pada lima strategi pencapaian tujuan, hampir sebagian besar GDPK daerah lebih fokus kepada satu bidang yaitu pengendalian kuantitas penduduk, sedangkan empat bidang lainnya yaitu peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, pengarahannya mobilitas penduduk dan pembangunan sistem data informasi kependudukan

kurang mendapatkan prioritas<sup>32</sup>. Akibatnya pemanfaatan bonus demografi melalui GDPK terkait peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan belum terlaksana secara maksimal.

Secara ideal, seharusnya GDPK ini terintegrasi dengan RPJMN sebagai dokumen perencanaan pembangunan. Apa yang ada dalam GDPK harus dijadikan rujukan dalam penyusunan RPJMN terkait kebijakan peningkatan kualitas SDM dan persoalan kependudukan. Pada Perpres No. 153 tahun 2014 tentang Penyusunan GDPK nasional, tidak disebutkan secara jelas bahwa tugas ketua koordinasi yaitu Menko PMK bertanggung jawab untuk mengintegrasikan penyusunan GDPK ke dalam RPJMN. Inilah yang kemudian membuat GDPK terkadang tidak sinkron dengan RPJMN.

Dalam UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, secara tegas mengamanahkan agar pengelolaan perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga diintegrasikan kedalam kebijakan pembangunan nasional jangka menengah, jangka pendek dan jangka panjang. Sementara perumusan GDPK sebagai upaya pembangunan bidang kependudukan harus terintegrasi pada RPJMN. Sejak awal dirumuskan GDPK 2014, seharusnya sudah terintegrasi dalam RPJMN 2015-2019 dan 2020-2024. Akan tetapi jika kita cek di RPJMN 2020-2024, tidak secara eksplisit tercantum penyusunan kebijakan pembangunan kependudukan termasuk di dalamnya peningkatan kualitas SDM yang mengacu kepada GDPK.

Dalam perspektif teori Malthusian Trap terkait kebijakan pengendalian kuantitas penduduk dengan kebutuhan pangan, kebijakan GDPK merupakan bagian dari *preventif check* yaitu sebuah upaya untuk mengendalikan jumlah penduduk seperti menunda pernikahan,

---

<sup>32</sup> Berdasarkan Data laporan dari kepala BKKBN Dr Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) dalam Siaran Press Rilis BKKBN Siaran Pers No. RILIS/78/B4/BKKBN/VIII/2019. Sumber; <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/grand-desain-pembangunan-kependudukan-atasi-dinamika-kependudukan-indonesia#:~:text=Sementara%20itu%2C%20berdasarkan%20Peraturan%20Presiden,yang%20berisi%20tentang%20isu%20penting.> Diunduh tanggal 11 Agustus 2020.

menunda kehamilan dan lainnya. Sedangkan peningkatan kualitas penduduk melalui aspek pendidikan (lama sekolah, angka partisipasi murni meningkat) dalam pandangan Malthus dianggap faktor non ekonomi yang akan berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Jadi kalau dalam GDPK pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas penduduk merupakan dua hal yang seolah terpisah dan tidak saling berkaitan, maka dalam pandangan Malthus sebaliknya, keduanya bersifat simbiosis mutualis dan saling mempengaruhi dimana jumlah penduduk (kuantitas) sangat dipengaruhi oleh kualitas penduduk melalui dua faktor tadi berupa *preventif chek* (faktor yang masih bisa kendalikan) dan faktor non ekonomi. Menurut Malthus, semakin berkualitas dan sejahtera sebuah penduduk, semakin meningkat kuantitas jumlah penduduk. Sebaliknya, dalam *mindset* GDPK jumlah penduduk harus dikendalikan dan ditingkatkan kualitasnya, sedangkan menurut pandangan Malthus, jumlah penduduk akan meningkat kalau kualitas hidupnya meningkat (makmur, sejahtera, sehat, pintar).

**b. Kendala Implementasi GDPK di Daerah.**

Tim perumus GDPK di daerah juga bertanggung jawab untuk mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu RPJMD. Contoh seperti yang tercantum dalam SK Bupati Samosir No. 127 tahun 2018, secara jelas dinyatakan bahwa tugas tim penyusun GDPK ini sekaligus bertanggung jawab mengintegrasikannya ke dalam RPJMD daerah. Demikian juga dengan Perbup Labuhan Batu No. 188.45 tahun 2018 tentang pembentukan tim penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) juga secara eksplisit menyatakan bahwa tim penyusun dalam merumuskan konsep GDPK kabupaten Labuhan Batu juga bertanggungjawab untuk mengintegrasikannya ke dalam dokumen RPJMD.

Konsep GDPK di beberapa daerah lebih menekankan tentang penanggulangan kuantitas penduduk dan kurang memperhatikan 4

aspek lainnya, memperlihatkan bahwa GDPK di tingkat daerah masih kurang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh GDPK nasional, dimana GDPK daerah harus mengacu dan merujuk kepada GDPK nasional. Ada beberapa faktor penyebab kurang maksimalnya implementasi GDPK di daerah yaitu:

- 1) Kurangnya kesadaran (*awareness*) Pemerintah Daerah terkait persoalan demografi.

Dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa urusan kependudukan adalah urusan pemerintahan daerah, bukan kewenangan pemerintah pusat. Dalam pasal 12 ayat 2 disebutkan bahwa urusan kependudukan baik dari sisi administrasi dan layanan sipil, maupun kependudukan dari aspek pengendalian dan keluarga berencana, merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Tidak semua kepala daerah memiliki sensitifitas kesadaran (*awareness*) terhadap persoalan kependudukan sebagai masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal ini karena isu kependudukan (demografi) dianggap kurang menarik di mata kepala daerah dibandingkan persoalan lain seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, ketengakerjaan dan lainnya. Padahal persoalan tersebut sangat berkaitan dengan peningkatan kualitas penduduk. Sebagai contoh, akses layanan pendidikan berkualitas dan akses layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau, keduanya sangat berkaitan erat dengan peningkatan SDM penduduk berkualitas dan berdaya saing.

- 2) Rendahnya kapasitas kelembagaan daerah.

Rendahnya kapasitas kelembagaan daerah dalam menyusun GDPK terlihat dari isi GDPK yang dibuat, dimana sebagian besar lebih berfokus kepada pengendalian kuantitas penduduk, sementara masalah peningkatan kualitas penduduk kurang mendapat perhatian padahal keduanya saling berkaitan. Jumlah

penduduk yang terkendali, harus didukung oleh kondisi kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, asupan nutrisi gizi yang cukup dan seimbang, lapangan kerja, data base kependudukan dan lainnya.

Padahal dalam SK, tim perumus boleh merekrut konsultan atau tenaga ahli dari luar, biasanya dari kalangan akademisi kampus atau NGO/LSM dalam membantu merumuskan GDPK dan menyusun *Roadmap*. Pemerintah perlu memfasilitasi kebutuhan daerah dalam penyusunan GDPK serta memberikan arahan kebijakan dalam menentukan sasaran dan target dari implementasi GDPK.

Rendahnya kapasitas kelembagaan daerah membuat kualitas GDPK dan penyusunan *Roadmap* tidak bisa men-cover keseluruhan kompleksitas permasalahan demografi di daerah tersebut. Kapasitas lembaga daerah dalam menyusun GDPK antara lain diperlukan untuk menentukan tahapan dan sasaran pelaksanaan kebijakan dan program, mengintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra Dinas) serta keberlanjutan (*sustainability*) pasca perodesasi jabatan kepala daerah. Hal ini penting agar tidak terjadi kondisi dimana saat pergantian kepala daerah maka akan terjadi pergantian kebijakan sehingga keberadaan GDPK dan *Roadmap* menjadi tidak jelas nasibnya ke depan.

3) Kuatnya ego sektoral masing-masing dinas/instansi.

Ego sektoral masing-masing dinas masih menjadi kendala dan hambatan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pengawasan implementasi GDPK. Hal ini karena masih ada persepsi bahwa persoalan kependudukan (pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas penduduk) hanya urusan dinas keluarga berencana sesuai tupoksinya, disisi lain tiap dinas merasa sudah memiliki tupoksi sendiri sendiri sesuai aturan hukum yang

ada serta adanya hirarkhi vertikal yang harus diikuti oleh instansi tersebut.

Kuatnya ego sektoral membuat sinergi dan koordinasi implementasi pelaksanaan roadmap GDPK menjadi tidak maksimal. Dalam kegiatan rapat-rapat koordinasi, seringkali yang hadir dari lintas sektoral adalah mereka yang tidak bisa mengambil keputusan, dengan orang yang sering berganti-ganti. Hal ini membuat keberadaan *Roadmap* GDPK hanya sekedar dokumentasi formalitas, sekedar ada demi memenuhi tuntutan dari pemerintah pusat.

4) Kurangnya dukungan anggaran daerah.

Selain masalah kapasitas personal dan kelembagaan, kendala implementasi *Roadmap* GDPK adalah kurangnya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah (APBD) terhadap pelaksanaan program-program *Roadmap* GDPK. Apa yang ada dalam roadmap biasanya sudah menjadi tupoksi kegiatan masing-masing dinas. Sementara Tim Pelaksana *Roadmap* GDPK yang terdiri dari berbagai sektoral dengan tim kesekretariatan dibawah Sekda, belum didukung anggaran yang memadai untuk operasional kegiatan Tim Pelaksana *Roadmap* GDPK.

Disisi lain, daerah menganggap karena ini kebijakan vertikal dari pusat, mereka berharap ada dukungan khusus alokasi anggaran dari pusat untuk program *Roadmap* GDPK. Sementara daerah sendiri beralasan anggaran daerah fokus kepada program masing-masing sektoral. Kondisi inilah yang membuat beberapa daerah mengalami keterlambatan dalam membuat *Roadmap* GDPK karena faktor ketiadaan anggaran serta persoalan lemahnya kapasitas SDM dan kelembagaan daerah.

## 14. Kondisi Daya Saing SDM Indonesia Dalam Persaingan Global.

### a. Kondisi Daya Saing SDM Indonesia di Tingkat Global.

Menurut laporan *Institute of Manajement Development* (IMD) tentang *IMD World Talent Report 2015*, dari 61 negara yang di survei, Indonesia berada di urutan ke-41 negara yang memiliki tenaga bekerja berbakat. Peringkat ini turun 16 dari urutan ke-25 pada tahun 2014, menjadi urutan ke-16 tahun 2015. Peringkat ini menempatkan Indonesia di bawah Singapura, Malaysia bahkan Thailand. Hal ini membuktikan bahwa untuk kawasan negara-negara ASEAN, tenaga kerja Indonesia kurang bisa memiliki daya saing dibandingkan tenaga kerja dari Singapura, Malaysia dan Thailand.

Tenaga kerja dari Indonesia memiliki kelemahan di luar keterampilan teknis yaitu kemampuan bahasa, kemampuan penguasaan komputer dan soft skill yaitu pengetahuan tentang nilai budaya masyarakat di negara tempat dia bekerja.

Akibat kurangnya daya saing TKI pada tiga faktor tersebut, TKI kita dihargai lebih rendah ketimbang tenaga kerja dari negara lain. Nilai transfer uang (remitansi) TKI kita di luar negeri lebih rendah ketimbang nilai remitansi tenaga kerja Filipina yang bekerja di luar negeri, karena tenaga kerja Filipina mendapat upah lebih mahal daripada TKI. Jumlah TKI Indonesia kurang lebih ada 9 juta orang dan separuhnya bekerja di Malaysia. Jumlah remitansi yang dikirim TKI sebesar Rp 108,32 triliun atau US\$ 8,1 miliar. Sedangkan Filipina yang jumlah tenaganya 10 juta, menghasilkan remitansi sebesar US\$28,1 miliar atau 3 kali lebih besar dari remitansi Tenaga Kerja Indonesia<sup>33</sup>.

Di bidang kesehatan, Indonesia pernah membangun perjanjian kemitraan dengan Jepang dalam program IJEPA (*Indonesia Japan Economic Partnership Agreement*) 2008-2013. Tujuan program ini untuk meningkatkan daya serap TKI keperawatan di Jepang. Para TKI tersebut

<sup>33</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181127151827-92-349615/menaker-ungkap-tiga-masalah-wni-sulit-kerja-ke-luar-negeri>. Diunduh tanggal 11 Agustus 2020.

diberikan keterampilan berbahasa dan berbudaya Jepang sebelum diberangkatkan. Hasilnya ada peningkatan jumlah TKI keperawatan yang diterima Jepang, meskipun kemudian tidak bertahan lama karena ada krisis ekonomi global yang mempengaruhi perekonomian Jepang.

Globalisasi ekonomi negara-negara kawasan serta liberalisasi perjanjian perdagangan seperti komunitas bersama ekonomi ASEAN (MEA), perjanjian perdagangan bebas kawasan ASEAN (AFTA), serta keterlibatan Indonesia dalam perdagangan bebas dengan China melalui AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) dalam konteks pemanfaatan bonus demografi seharusnya menjadi jendela peluang (*windows of opportunity*) untuk bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga bonus demografi bisa menjadi berkah, memberikan keuntungan secara ekonomis dan politis bagi Indonesia.

Kondisi yang terjadi justru sebaliknya, dengan SDM yang berdaya saing rendah dan produktifitas yang turun, Indonesia hanya menjadi penonton dan asing di negerinya sendiri. Apalagi dengan model investasi versi China dengan konsep *Turnkey Manajemen Project* dimana investasi asing tidak hanya mencakup modal finansial, tapi juga modal teknologi dan sumber daya manusia. Akibatnya meski Indonesia banyak melaksanakan proyek infrastruktur ataupun proyek pengolahan sumber daya alam, akan tetapi yang mengerjakannya tetap Tenaga Kerja Asing (TKA) dari negara investor. Padahal gaji TKA ini bisa lebih besar bahkan 3 kali lipat dari tenaga kerja lokal<sup>34</sup>. Inilah yang kemudian menimbulkan pro kontra kedatangan TKA ke Indonesia dimana Indonesia masih memiliki banyak pengangguran dan tingginya angka kemiskinan, harus menjadi penonton dan orang asing di negaranya sendiri.

Rendahnya daya saing tenaga kerja Indonesia di dunia global dalam perspektif teori Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge Basec Economy*) Peter Drucker karena kurangnya kapasitas pengetahuan para tenaga kerja. Mereka lebih banyak mengandalkan

---

<sup>34</sup> <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/04/26/p7snz8409-ombudsman-gaji-tka-tiga-kali-lipat-dari-tenaga-kerja-lokal>. Diunduh tanggal 30 September 2020

kerja fisik (otot) ketimbang kerja kerja pengetahuan (otak). Sektor pekerjaan seperti pembantu rumah tangga, tenaga kasar bangunan, buruh perkebunan, sopir dan lainnya adalah pekerjaan yang lebih mengandalkan otot ketimbang kerja otak. Padahal para TKI sebagai salah satu penghasil devisa negara terbesar merupakan aset yang harus ditingkatkan kapasitas modal pengetahuan selain *soft skillnya*.

Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA), harus didukung oleh SDM yang kompetitif. Dalam pandangan teori daya saing Zuhaili, keunggulan komparatif kelebihan SDA harus mendapatkan sentuhan Iptek mutakhir. Tanpa sentuhan SDM yang menguasai Iptek, maka SDA Indonesia hanya menjadi sapi perah pihak asing dan tenaga kerja Indonesia menjadi penonton dari pengelolaan SDA di negaranya sendiri.

Untuk menghasilkan SDM yang kompetitif dan menguasai Iptek sehingga menghasilkan keunggulan kompetitif, pemerintah harus memberikan keleluasaan, kebebasan dan peningkatan kesejahteraan kepada para ilmuwan peneliti untuk melakukan riset-riset inovasi dengan seminimal mungkin mengurangi intervensi politik. Keberadaan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) yang mencoba mengintegrasikan lembaga lembaga riset seperti LIPI, LAPAN, BATAN dan BPPT harus bisa menjadi garda depan dalam mendorong riset-riset inovatif dan mengembangkan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*).

Fenomena yang terjadi sekarang ini, banyak terjadi pelarian ilmuwan Indonesia keluar negeri (*brain drain*) dimana orang Indonesia yang sudah selesai kuliah di luar negeri, mereka enggan kembali ke Indonesia dengan alasan karena tidak adanya jaminan kebebasan akademik untuk bisa mengembangkan riset inovatif serta jaminan kesejahteraan yang minim dibandingkan gaji (*salary*) yang diberikan negara-negara barat. Mereka akhirnya direkrut oleh perusahaan asing untuk mengembangkan riset inovatif dengan jaminan kebebasan akademik dengan jaminan kesejahteraan yang tinggi.

**b. Faktor Penyebab Rendahnya Daya Saing Indonesia.**

Kelemahan dalam hal bahasa dan kurangnya kemampuan memahami nilai budaya masyarakat setempat membuat para TKI tidak bisa beradaptasi terhadap lingkungan baru, memahami kebiasaan, norma dan budaya setempat. Akibatnya para TKI tidak mampu berkomunikasi dengan baik sehingga ketika dihadapkan pada suatu permasalahan, para TKI tersebut mengambil tindakan yang salah.

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak 2015 yang di tandai dengan arus keluar masuknya sektor barang dan jasa di negara-negara ASEAN membuat Indonesia harus berbenah memperbaiki kualitas SDM tenaga kerja agar bisa bersaing dengan tenaga kerja negara ASEAN. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2019 memperlihatkan bahwa tenaga kerja kita mayoritas lulusan pendidikan dasar dan menengah dengan keterampilan skill yang minim, hal ini membuat mereka lebih banyak hanya bekerja di sektor informal. Beberapa faktor penyebab rendahnya daya saing Indonesia ditingkat global yaitu:

1) Rendahnya kualitas pendidikan.

Tinggi rendahnya kualitas pendidikan sebuah bangsa, menentukan maju mundurnya peradaban bangsa tersebut. Bangsa Jepang ketika hancur akibat serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945 oleh sekutu, berhasil bangkit dari keterpurukan dan menjadi bangsa besar yang maju dan modern karena perhatiannya yang sangat tinggi terhadap dunia pendidikan yang menghasilkan kemajuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Beberapa kendala yang dihadapi Indonesia dalam meningkatkan kualitas SDM sehingga tidak memiliki daya saing ditingkat global dari aspek pendidikan, diantaranya yaitu:

a) Masih kurangnya akses dan layanan pendidikan berkualitas yang terjangkau dan merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Tugas negara sebagaimana perintah UUD NRI Tahun 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membuat setiap warga negara berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Termasuk akses dan layanan pendidikan berkualitas mencakup infrastruktur pendidikan, anggaran pendidikan, tenaga pendidik yang kompeten, fasilitas dan sarana yang memadai. Selama ini akses layanan pendidikan berkualitas masih sangat kurang untuk masyarakat daerah pinggiran, terluar dan perbatasan, karena keterbatasan infrastruktur pendidikan dan sarana pendukung lainnya serta rendahnya kesejahteraan untuk tenaga pendidik.

- b) Kurang maksimalnya pemanfaatan anggaran pendidikan 20% APBN dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini karena 20% anggaran pendidikan dihitung juga termasuk pendidikan kedinasan, juga masih adanya korupsi di dunia pendidikan serta kendala birokrasi terkait aturan yang ada, sehingga anggaran pendidikan masih belum bisa dimanfaatkan secara lebih maksimal dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan, perbaikan sarana prasarana serta kesejahteraan stakeholder pendidikan.
- c) Masih rendahnya kualitas standar kompetensi guru dalam menguasai materi pelajaran dan metode pembelajaran, kurikulum pendidikan dan standar output lulusan. Standar kompetensi guru yang mencakup kompetensi sosial, kompetensi pedagogic dan kompetensi profesional masih jauh dari terpenuhi secara ideal. Mutu pendidikan juga berkaitan dengan penguasaan kemampuan TIK 4.0 yang semakin berkembang sehingga diperlukan adaptasi kemampuan penguasaan TIK dari seluruh stakeholder pendidikan.
- d) Masih rendahnya standar kualitas lulusan sekolah karena kurikulum yang diajarkan tidak bisa menjawab tantangan

kebutuhan zaman, proses pembelajaran yang kurang mendukung kemampuan berpikir kritis, kreatif dan inovatif atau *Hight Order Thinking Skill* (HOTS).

- e) Kurangnya sinergi dan kolaborasi dunia pendidikan vokasi (kejuruan) dengan dunia usaha dan industri sehingga lulusannya tidak terserap ke dunia kerja. Hal ini karena kurikulum yang dibuat dan output lulusan tidak memiliki kompetensi keterampilan sesuai yang dibutuhkan dunia industri dan dunia kerja.
- f) Masih kurangnya pendidikan kejuruan atau pendidikan vokasi baik pada level pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi dibandingkan pendidikan akademik. Berdasarkan data Kemristekdikti 2019, jumlah pendidikan akademik dua kali lipat daripada pendidikan vokasi yaitu 2.141 untuk pendidikan akademik dan 1.128 untuk pendidikan vokasi. Padahal idealnya untuk meningkatkan daya saing, program pendidikan vokasi harus diperbanyak dibandingkan pendidikan akademik dan lebih dibutuhkan dalam menyiapkan tenaga kerja siap pakai yang mampu bersaing dengan dunia luar.
- g) Kurang maksimalnya proses pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi Covid-19. Proses belajar online hanya mengajarkan anak dari aspek pengetahuan tapi tidak menyentuh aspek kognitif dan psikomotorik. Hasil survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada Maret-April 2020 memperlihatkan bahwa Pembelajaran Jarak Jauh tidak efektif hasilnya. Sebanyak 79,9% menyatakan PJJ tidak efektif karena tidak ada interaksi guru-murid<sup>35</sup> kecuali guru hanya memberikan perintah dan tugas, 73% menyatakan keberatan dengan tugas-tugas dari guru, 76,7% menyatakan tidak senang belajar dari rumah.

---

<sup>35</sup> <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-pembelajaran-jarak-jauh-minim-interaksi>. Diunduh tanggal 30 September 2020

- h) Program kegiatan pelatihan keterampilan bagi masyarakat usia produktif juga terhenti akibat wabah Covid-19 dan digantikan dengan pelatihan online terkait bidang pendidikan, kesehatan, keterampilan kerja dan lainnya. Beberapa lembaga pelatihan selama masa pandemi mengalami kebangkrutan keuangan karena juga tidak dilibatkan dalam program-program pemerintah.

Hubungan kualitas pendidikan dalam meningkatkan daya saing, dalam perspektif teori daya saing Zuhail karena pendidikan bisa meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dari lima modal yang bisa meningkatkan daya saing, maka modal manusia memiliki peranan penting dalam mendorong kemajuan manusia.

- 2) Faktor budaya yang tidak mendukung kemajuan.

Faktor sosial budaya yang berkembang di masyarakat menjadi kendala atau penghambat dalam meningkatkan daya saing bangsa. Diantara beberapa alasan faktor penghambat sosial budaya karena alasan sebagai berikut:

- a) Pemahaman dan keyakinan seseorang bersumber dari doktrin kitab suci ajaran agama yang cenderung eksklusif, tidak sesuai (*incompatible*) dengan kemajuan dan kemodernan. Cara pandang yang serba irasional, mistik dan takhayul membuat cara berpikir masyarakat menjadi sempit dan berlawanan dengan nilai ilmu pengetahuan.
- b) Adanya sikap tertutup terhadap perubahan kemajuan dan kemodernan. Sikap tertutup ini terjadi karena adanya ketakutan dan kekhawatiran penduduk terhadap sesuatu hal yang baru, yang dianggap berpotensi menjadi ancaman terhadap kondisi status quo mereka, sehingga timbul penolakan atau resistensi warga masyarakat.

c) Adanya polarisasi struktur kelas sosial yang menimbulkan ketimpangan dan segregasi sosial di masyarakat. Polarisasi kelas sosial antara kaum kaya dan miskin, kelas ningrat aristokrat dengan orang awam, menjadi penyebab tidak meratanya pengembangan skill potensi masyarakat sehingga berdampak terhadap rendahnya daya saing.

3) Rendahnya etos kerja dan produktifitas SDM.

Lemahnya produktifitas SDM karena kualitas yang sangat rendah, kurangnya etos kerja, serta sistem pendidikan yang tidak menghasilkan SDM yang kreatif dan inovatif. Rendahnya kualitas dan produktifitas SDM karena sebaran SDM yang tidak merata, banyak terkonsentrasi di pulau Jawa. Akibat sebaran penduduk yang tidak merata, maka pusat-pusat keunggulan (*center of excellence*) juga tidak merata. Akibatnya timbul ketimpangan pembangunan antar wilayah sehingga ketidakmerataan SDM yang berkualitas berdampak terhadap produktifitas.

Disisi lain nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat kurang mendukung peningkatan produktifitas dan etos kerja. Misalnya cara pandang masyarakat yang masih berpegangan pada sebuah ungkapan "*mangan ora mangan sing penting kumpul*" (makan tidak makan yang penting bisa bersama sama), filosofi yang jika disalah pahami membuat orang kurang memiliki etos kerja tinggi, lebih mengedepankan kebersamaan ketimbang sebuah produktifitas. Demikian juga dengan pandangan hidup "*kerjo ora usah ngoyo, urip mung mampur ngombe*" (jangan terlalu kerja keras, hidup cuma sebentar) dan beberapa cara pandang lain masyarakat yang terkadang menghambat etos kerja dan produktifitas.

Rendahnya etos kerja dan produktifitas inilah yang membuat daya saing SDM Indonesia menjadi kurang dalam persaingan global, dalam pandangan Zuhaili modal kelima yaitu modal manusia berupa kemampuan manusia untuk berinisiatif dan berkreatif

mengembangkan inovasi baru dan hal-hal terkait kewirausahaan. Jadi etos kerja dan produktifitas tidak sekedar kuantitatif (jumlah produksi) tapi juga kualitatif yaitu kemampuan menghasilkan produk inovatif sehingga memiliki nilai tambah (*added value*) dibandingkan produk lain.

4) Kurangnya perhatian terhadap penduduk usia tidak produktif.

Pemanfaatan bonus demografi tidak hanya berkaitan dengan usia penduduk produktif (16-64 tahun) tapi pemanfaatan bonus demografi juga harus memperhatikan penduduk usia tidak produktif yaitu penduduk lanjut usia dan penduduk usia dibawah 16 tahun. Beberapa permasalahan yang dihadapi penduduk lanjut usia sekarang ini adalah:

- a) Rendahnya produktifitas penduduk usia lanjut. Hal ini karena penduduk lansia pada umumnya tidak memiliki skill keterampilan, latar belakang pendidikan yang rendah, hidup dalam kemiskinan dan kondisi fisik yang sering sakit-sakitan.
- b) Kurangnya tingkat kesejahteraan penduduk lanjut usia. Masih belum terpenuhinya kesejahteraan lansia karena banyak para Lansia yang masih belum masuk program jaminan sosial berupa jaminan hari tua, jaminan pensiun baik pekerja formal maupun informal. Mereka tetap terlunta-lunta nasibnya di hari tua bahkan tanpa ada pihak atau keluarga yang mengurusnya. Selain itu juga masih banyak fasilitas umum dan pelayanan publik yang terdapat di mall, stasiun, perkantoran, hotel dan lainnya yang tidak ramah lansia.
- c) Adanya pemahaman yang salah di internal keluarga dan masyarakat dalam menyikapi warga lanjut usia. Ada kalangan internal keluarga yang menganggap lansia bukan bagian anggota keluarga, bahkan menempatkan mereka di panti jompo sehingga para lansia menjadi teralienasi dan terpinggirkan.

Sedangkan untuk penduduk usia tidak produktif dari dibawah usia 16 tahun, kondisi yang terjadi dari aspek kesehatan masih banyaknya anak-anak yang gagal dalam tumbuh kembang sehingga mengalami tubuh pendek (*stunting*). Faktor lainnya karena kemiskinan orang tuanya dimana mereka kurang bisa mendapatkan asupan nutrisi dan gizi seimbang, sehingga mengalami busung lapar dan kurang asupan gizi untuk pertumbuhan otak sehingga daya kemampuan berpikirnya sangat kurang.

#### **15. Konsepsi Kebijakan Pemanfaatan Bonus Demografi Dalam Meningkatkan Kompetensi Global.**

Dalam perspektif teori Zuhaili bahwa untuk meningkatkan daya saing perlu ada inovasi berbasis ilmu pengetahuan sehingga keunggulan komparatif bisa menjadi keunggulan kompetitif karena sentuhan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kebijakan pemanfaatan bonus demografi dalam meningkatkan daya saing global memerlukan keterlibatan dan sinergi semua pihak, baik tingkat pusat maupun daerah serta bersifat lintas sektoral, termasuk juga multistakeholder dari masyarakat, akademisi, LSM, media dan lainnya. Mereka semua harus terlibat dan dilibatkan dalam merumuskan perencanaan kebijakan dan melaksanakan kebijakan pemanfaatan bonus demografi ini sehingga bisa mencapai hasil yang maksimal. Semua pihak harus merasakan bahwa persoalan kelebihan penduduk ini masalah bersama, bukan sekedar tanggung jawab pemerintah semata.

Oleh sebab itu dalam merumuskan konsepsi kebijakan pemanfaatan bonus demografi haruslah dengan pendekatan yang lebih sistematis, terencana dan terukur capaian keberhasilannya (*measurable*). Selain itu, juga perlu ada sistem monitoring dan evaluasi dari implementasi konsepsi kebijakan pemanfaatan bonus demografi sehingga bisa diketahui kelemahan dan kekurangannya untuk kemudian dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, baik dari aspek konsep kebijakan maupun teknis pelaksanaan operasionalnya.

a. **Ketersediaan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).**

Persiapan Pemerintah Daerah dalam menyongsong datangnya bonus demografi diantaranya dilakukan dengan merumuskan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dan *Roadmap* didalamnya yang sudah dimulai sejak keluarnya Perpres No. 153 tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). GDPK ini diharapkan bisa jadi role model dan rujukan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk jadi rumusan kebijakan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan baik di pusat (RPJMN) maupun di daerah (RPJMD) yang dibuat secara jangka panjang sejak, untuk kemudian dilakukan evaluasi setiap lima tahunnya. Tujuannya agar bisa diketahui capaian kemajuan, kendala dan hambatan sehingga bisa dirumuskan langkah solusinya.

Jika konsep kebijakan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dengan *Roadmap* tidak bisa dilaksanakan secara konsisten atau daerah tidak menjadikannya sebagai acuan dalam kebijakan pembangunan kependudukan di daerah, maka akan terjadi inkonsistensi kebijakan dan ketidaksinambungan antara pusat dan daerah. Masing-masing daerah akan merumuskannya sendiri tanpa ada koordinasi dan sinergi dengan pusat yang mengakibatkan terjadinya kekacauan dalam tata kelola kebijakan pemerintah. Hasilnya kita akan menjadi negara yang gagal dalam merespon datangnya bonus demografi 2020-2040 nantinya. Bonus Demografi yang seharusnya bisa menjadi jendela peluang (*window opportunity*) malah menjadi musibah bencana bagi kita.

Untuk itulah perlu ada rumusan konsepsi kebijakan dalam menyiapkan datangnya bonus demografi melalui implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yaitu :

- 1) Membangun sinergi pusat dan daerah.

Dalam penyusunan dan perumusan kebijakan GDPK, perlu ada sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. GDPK harus menjadi *mainstreaming* dalam merumuskan semua

kebijakan pembangunan baik dalam RPJMN maupun RPJMD serta Renstra di tiap lintas sektoral. Pemerintah pusat harus memastikan bahwa GDPK dan *Roadmap* ini tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMN) dan Renstra tiap Kementerian dan Lembaga (K/L) dengan tahapan pelaksanaan, capaian target dan sasaran yang jelas dan terukur serta ada monitoring dan evaluasi yang jelas.

Pemerintah pusat juga harus bisa memastikan bahwa semua daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) seluruh Indonesia sudah menyusun dokumen GDPK serta roadmapnya. Selain itu juga perlu dicek apakah dokumen GDPK yang dibuat oleh daerah sudah sesuai dengan tujuan, strategi dan arah kebijakan dengan GDPK yang ada ditingkat nasional karena berdasarkan data selama ini, GDPK di daerah lebih banyak yang membahas aspek pengendalian kuantitas penduduk, tapi kurang memperhatikan sisi peningkatan kualitas penduduk.

Selain sinergi pusat daerah, juga perlu sinergi sektoral daerah. Oleh sebab itu perlu dihilangkan ego sektoral di daerah. Pemerintah Daerah dalam hal ini Sekretaris Daerah selaku leading sektor sebagai ketua tim penyusunan GDPK perlu bersikap tegas terhadap sektoral yang masih belum terlibat secara serius dalam merumuskan GDPK atau tidak menjadikan GDPK menjadi bagian dalam penyusunan Renstra (program lima tahunan) dan Rencana Kerja (Program Setahun) masing-masing dinas.

2) Integrasi GDPK dalam perencanaan pembangunan.

Penyusunan GDPK dan *Roadmap* kependudukan yang terintegrasi ke dalam RPJMN ataupun RPJMD tidak hanya sekedar formalitas, hal yang penting ada tapi tidak jelas bagaimana tahapan implementasinya. Oleh sebab itu, agar daerah serius dalam merumuskan GDPK maka perlu ada insentif pendanaan yang ditawarkan oleh pusat kepada daerah yang berhasil merumuskan

GDPK, mengintegrasikannya ke dalam perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, Renstra) serta mampu melaksanakannya dengan cara-cara yang lebih kreatif dan inovatif. Pola ini akan memicu dan memacu daerah untuk berkompetisi dalam menyusun dan merumuskan GDPK beserta roadmapnya.

Integrasi GDPK dan *Roadmap* dalam perencanaan pembangunan daerah serta Renstra tiap sektoral, harus bisa dipastikan terhindar dari tumpang tindih (*overlap*) tiap sektor, baik dari segi kebijakan, program maupun usulan kegiatannya, karena akan berdampak terhadap sisi penganggaran. Integrasi GDPK dalam perencanaan pembangunan juga perlu melibatkan sektor swasta dan multi *stakeholder* terkait lainnya karena pada dasarnya persoalan pembangunan kependudukan adalah masalah bersama baik pemerintah maupun swasta.

3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan daerah.

Permasalahan kapasitas kelembagaan daerah dalam menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) karena keterbatasan SDM aparatur pemerintahnya. Kalau kita baca laporan Mendagri<sup>36</sup>, sebagian besar daerah yang belum merumuskan GDPK adalah daerah yang termasuk kategori daerah miskin, tertinggal, daerah perbatasan dan daerah terluar. Terkadang dokumen perencanaan GDPK yang dibuat copy paste dari daerah lain tanpa sempat ada penyesuaian data dengan data di daerahnya sendiri.

Peningkatan kapasitas kelembagaan daerah melalui program Bimbingan Teknis (Bimtek), asistensi dan pendampingan dari pusat ke Provinsi, atau dari Provinsi ke Kabupaten, diharapkan bisa meningkatkan SDM aparatur Pemerintah Daerah dalam

---

<sup>36</sup>[https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca\\_kontent/1463/mendagri\\_tito\\_karnavian\\_surati\\_daerah\\_yang\\_belum\\_menyusun\\_grand\\_design\\_pembangunan\\_kependudukan](https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/1463/mendagri_tito_karnavian_surati_daerah_yang_belum_menyusun_grand_design_pembangunan_kependudukan). Diunduh tanggal 30 September 2020

merumuskan GDPK sehingga bisa lebih realistis, bisa dilaksanakan dengan capaian keberhasilan yang lebih terukur. Tujuan Bimtek, asistensi dan pendampingan agar ada standarisasi model penyusunan GDPK, menghindari terjadinya tumpang tindih kebijakan dan program serta memastikan terintegrasikannya GDPK dalam perencanaan pembangunan daerah beserta tahapan roadmapnya.

b. **Implementasi *Roadmap* Grand Design Pembangunan Kependudukan.**

Pelaksanaan *Roadmap* Grand Design pembangunan kependudukan merupakan sebuah upaya pemerintah dalam mensiasati datangnya bonus demografi sehingga bisa menjadi berkah dan bukan musibah serta menjadi peluang kesempatan (*windows opportunity*) untuk memanfaatkannya dalam meningkatkan SDM secara lebih berkualitas, produktif, inovatif sehingga bisa berdaya saing ditingkat global.

Konsepsi kebijakan dalam implementasi GDPK harus mengacu kepada roadmap untuk mencapai tujuan umumnya yaitu meningkatkan kualitas penduduk yang tinggi sehingga bisa menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa dan tujuan khususnya yaitu pertumbuhan penduduk yang seimbang, warga Indonesia yang beriman, bertakwa, sehat, cerdas, berakhlak mulia, memiliki etos kerja yang tinggi, keluarga Indonesia yang berketahanan, sejahtera, maju mandiri dan harmoni, keseimbangan sebaran penduduk yang sesuai dengan daya tampung alam dan lingkungannya serta dukungan administrasi kependudukan yang tertib, akurat dan dapat dipercaya.

Oleh sebab itu konsepsi kebijakan yang dirumuskan berikut ini merupakan sebuah gambaran ideallitas yang diharapkan dalam implementasi GDPK dan *Roadmap*nya.

- 1) Pemetaan penduduk usia produktif dan non produktif.

Setelah pemerintah pusat dan daerah berhasil merumuskan GDPK dan *Roadmap*nya, maka perlu ada sebuah peta sebaran

penduduk baik usia produktif maupun tidak produktif dalam akses layanan pendidikan, lapangan kerja, mobilitas sebaran penduduk dan ketahanan keluarga dalam rangka pencapaian bonus demografi 2020-2040. Pemetaan bertujuan untuk mengetahui capaian roadmap berdasarkan tujuan dan variabelnya.

Untuk sebaran usia penduduk tidak produktif terdiri dari usia <16 tahun dan >64 tahun. Untuk usia >64 tahun, pemetaannya dilihat dari aspek kesehatan, kesejahteraan dan serapan dalam pekerjaan. Sedangkan untuk usia non produktif < 16 tahun dilihat dari asupan kecukupan nutrisi dan gizi, tumbuh kembang anak, akses layanan pendidikan dasar dan menengah.

Pemerintah juga perlu mengantisipasi transisi jumlah penduduk usia non produktif menjadi penduduk usia produktif dalam 5 tahun kedepan. Penduduk yang sekarang berusia dibawah 16 tahun, dalam 5 tahun kedepan akan menjadi usia produktif. Pemerintah harus bisa memberikan jaminan kepastian terhadap akses layanan pendidikan berkualitas dan terjangkau, peningkatan keterampilan melalui pelatihan, serta penyaluran terhadap dunia industri dan usaha.

Pemetaan penduduk usia produktif dan non produktif bersifat bottom up yaitu dari tingkat kecamatan, kabupaten, kota terus ke atas sampai ke pusat. Hal ini karena yang punya adalah satuan pemerintahan paling bawah yaitu Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Provinsi menerima data dari Kabupaten/Kota, untuk kemudian dilaporkan ke tingkat pusat yaitu Tim Nasional Pelaksanaan *Roadmap* Grand Design Pembangunan Kependudukan (GPDK). Dari situlah bisa dipetakan sejauh mana pencapaian bonus demografi melalui sebaran penduduk usia produktif dan non produktif dengan melihat perbandingan wilayah antar pulau, desa - kota, jawa luar jawa dan lainnya.

2) Pengendalian kuantitas penduduk.

Pengendalian kuantitas penduduk merupakan salah satu tujuan untuk mengontrol dan mengendalikan perkembangan jumlah penduduk. Menurut Robert Malthus, perkembangan jumlah penduduk yang tidak diikuti oleh jumlah kebutuhan makanan, akan menimbulkan permasalahan sosial. Disisi lain, meningkatnya kesejahteraan sosial termasuk ketersediaan makanan dan sarana prasarana lainnya, akan mendorong meningkatnya jumlah penduduk.

Dalam situasi Covid-19, pengendalian kuantitas jumlah penduduk perlu lebih dintensifkan dan tetap menjadi perhatian utama pemerintah selain penanganan sebaran Covid-19. Beberapa kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pengendalian kuantitas penduduk adalah:

a) Pengendalian jumlah penduduk melalui program KB.

Pemerintah perlu tetap mengintensifkan pengendalian angka kelahiran, jarak kehamilan dalam program Keluarga Berencana (KB) dalam norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Sosialisasi pentingnya ikut program KB kepada para pasangan yang akan menikah, untuk bisa membatasi jumlah kelahiran sangat penting dilakukan. Keikutsertaan penduduk dalam program KB bukan semata untuk kepentingan pemerintah dalam mengendalikan jumlah penduduk, namun juga untuk mengedukasi masyarakat pentingnya pemahaman pentingnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Pengendalian jumlah penduduk melalui KB harus melibatkan para tokoh masyarakat terutama tokoh agama, tokoh perempuan, guru, kyai, ustadz dan lainnya. Hal ini karena masih adanya pemahaman yang kurang tepat di masyarakat bahwa banyak anak banyak rezeki. Atau adanya keyakinan yang berkembang bahwa setiap anak sudah

ditentukan rizkinya oleh Tuhan. Jadi mereka meyakini bahwa setiap anak yang dilahirkan tidak akan kelaparan. Pandangan sosial ini yang banyak menghinggapi penduduk terutama yang berpendidikan rendah, sehingga mereka tidak bisa mengendalikan jarak kehamilan dan kelahiran anak.

b) Edukasi bimbingan pra nikah.

Bimbingan konseling perlu dilakukan kepada pasangan muda mudi yang akan menikah. Pemerintah beberapa waktu lalu pernah mewacanakan soal sertifikasi pernikahan, dimana bagi pasangan muda mudi yang akan menikah harus ikut program pelatihan pra nikah untuk bisa mendapatkan sertifikasi pernikahan. Meskipun gagasan ini dianggap kontroversi dan mendapat penolakan dari berbagai pihak, tapi tujuannya sangat baik dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.

Dalam program pelatihan pra nikah, pasangan calon pengantin akan diajarkan berbagai hal termasuk diantaranya soal kesehatan reproduksi, tanggung jawab serta hak dan kewajiban suami istri, manajemen pengelolaan sumber daya keluarga dan lainnya. Tujuannya agar calon pasangan pengantin ini bisa lebih dewasa, bijak dalam bersikap dan bertindak. Misalnya ketika sebuah keluarga dihinggapi masalah soal ekonomi atau faktor orang ketiga, lalu ambil keputusan untuk bercerai, padahal mereka sudah punya anak yang masih kecil.

c) Penataan administrasi kependudukan

Selain melalui program KB untuk pengendalian penduduk secara kuantitatif, pemerintah juga perlu melakukan penataan sistem administrasi kependudukan melalui *Single Identity Number* (SIN) yang mengintegrasikan data kependudukan di tingkat pusat dengan di daerah. Kebijakan SIN bertujuan untuk memetakan data kependudukan, sebaran jumlah

penduduk antar daerah dan menghindari kerancuan, tumpang tindih data kependudukan lintas sektoral pada kartu identitas seperti KTP, SIM, STNK, NPWP, Paspor, dan lainnya

3) Peningkatan kualitas penduduk usia produktif dan non produktif.

a) Kualitas kesehatan.

Untuk penduduk usia produktif, kualitas kesehatan dilihat dari kecukupan asupan nutrisi dan gizi seimbang, sehingga mereka bisa tumbuh kembang secara sehat dan normal dan ideal dari sisi usia, tinggi dan berat badan. Kualitas kesehatan usia non produktif >64 tahun juga dilihat dari pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH) yang terus meningkat, usia tua tetap sehat, bebas penyakit dan masih tetap produktif, tidak terbuang dan tetap berkumpul bersama anggota keluarganya.

Sementara kualitas kesehatan usia non produktif untuk penduduk dibawah usia 16 tahun adalah ketercukupan gizi protein sehingga mereka bisa tumbuh kembang secara normal, tidak mengalami gagal tumbuh (*stunting*), mendapatkan imunisasi penuh dalam pos pelayanan terpadu (posyandu), asupan ASI eksklusif selama satu tahun, mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya secara penuh dan tidak mendapatkan tindak kekerasan baik fisik maupun psikologis.

b) Kualitas pendidikan.

Menurut Zuhail tentang daya saing sebuah bangsa, dari lima modal yang dimiliki sebuah negara yaitu modal alam, modal budaya, modal sosial, modal infrastruktur dan modal manusia, maka modal manusia lah yang sangat penting dan menentukan kemajuan sebuah bangsa. Oleh sebab itu perhatian terhadap modal manusia dengan meningkatkan

kualitas SDM melalui pendidikan yang berkualitas haruslah menjadi investasi masa depan sebuah bangsa.

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mendidik manusia untuk bisa memberikan solusi, bukan menjadi sumber masalah. Oleh sebab itu modal pembelajarannya harus berbasis problem solving (menyelesaikan masalah) berdasarkan situasi kondisi yang ada (*evidence based*), kontekstual dan aktual sehingga output yang dihasilkan bisa memberikan kontribusi menyelesaikan masalah dan lulusannya menciptakan lapangan kerja bukan pencari kerja.

Meskipun sekarang dalam situasi Covid-19 dimana proses belajar dilakukan secara daring jarak jauh, tapi tetap tidak boleh mengurangi aspek kualitas. Guru dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam pembelajaran kepada anak dengan tetap mengedepankan aspek attitude, kognitif dan psikomotorik. Orang tua juga harus ikut mendampingi anak selama proses belajar jarak jauh untuk dapat memberikan pendampingan kepada anak dalam memahami mata pelajaran. Demikian juga dengan proses pendidikan di Perguruan Tinggi tetap harus terus dilakukan dengan cara-cara kreatif inovatif, memanfaatkan semua potensi sumber belajar termasuk dari sumber data digital.

c) Kualitas keterampilan (*skill*).

Pengembangan skill keterampilan harus terus dilakukan ditengah situasi Covid-19. Balai Latihan Kerja (BLK) di tiap kabupaten perlu terus melakukan program pengembangan pelatihan keterampilan dengan tetap mengikuti standari protokol Covid-19, bekerjasama dengan dunia usaha dan industri yang ada di wilayahnya.

Program pemerintah untuk melakukan pelatihan online bisa di sinergikan dengan pelatihan non online yang dikelola

oleh Balai Latihan Kerja. Selain itu juga bisa dilakukan melalui program magang kerja yaitu program penempatan siswa yang sudah selesai ikut pelatihan kerja untuk magang di sebuah perusahaan, pabrik dan lainnya. Program magang ini untuk memberikan pengalaman kerja kepada siswa sebelum lulus untuk jadi bekal ketika mereka nantinya melamar pekerjaan ke tempat lain.

4) Peningkatan ketahanan keluarga.

Peningkatan kualitas penduduk melalui keluarga yang berdasarkan ikatan pernikahan yang sah bertujuan untuk memperbaiki kualitas penduduk. Tujuannya agar anak yang dilahirkan dari keluarga yang sah ini mengetahui siapa kedua orang tuanya, jelas status hukum si anak dan bisa mendapatkan kasih sayang kedua orang tua. Tujuan lainnya agar anak yang lahir dalam ikatan pernikahan yang sah memiliki motivasi, tujuan dan semangat hidup yang kuat, memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan moral, kecerdasan sosial dan kecerdasan spiritual.

Pembangunan keluarga melalui ikatan pernikahan yang sah juga untuk melahirkan keluarga sehat dan sejahtera, beriman dan bertakwa, memiliki akhlak dan moralitas dalam mendidik anak dengan nilai-nilai agama (religiositas) sehingga anak-anak bisa tumbuh berkembang dalam lingkungan yang sehat, mandiri dan sejahtera.

Pembangunan ketahanan keluarga juga dilakukan melalui peningkatan Kemampuan Manajerial Sumber Daya Keluarga yaitu keluarga yang mampu mengelola potensi sumber daya keluarga seperti potensi penghasilan suami, potensi penghasilan istri, mengkalkulasi kebutuhan dan biaya hidup bulanan, prioritas dalam membeli kebutuhan barang rumah tangga dan lainnya. Dengan kemampuan manajerial pengelolaan sumber daya keluarga mereka bisa melakukan penghematan, tabungan (*saving*) untuk prioritas kebutuhan pendidikan anak dan lainnya sehingga anak-anak tidak

terlantar pendidikannya, orang tua tidak mengalami kesulitan finansial dan mereka bisa hidup rukun bahagia.

5) Mobilitas pengarahannya penduduk.

Sebaran penduduk yang tidak merata antar wilayah menyebabkan terjadinya disparitas sosial dalam kelebihan jumlah penduduk antara Jawa dengan luar Jawa, antara desa dengan kota. Akibatnya jumlah penduduk wilayah Jawa mengalami kelebihan beban penduduk (*overload*) dengan luas lahan, kepemilikan tanah dan sawah sangat terbatas. Dalam pandangan Malthus, jumlah penduduk yang tidak berbanding lurus dengan perkembangan jumlah makanan akan membuat kegoncangan sosial ekonomi karena ketimpangan populasi penduduk.

Meskipun masalah kependudukan merupakan masalah otonomi, tapi dalam konteks mengatasi masalah sebaran penduduk dalam rangka pemanfaatan bonus demografi, beberapa daerah yang jarang penduduknya seperti di wilayah Indonesia Timur, diharapkan bisa membuka diri untuk membantu pemerintah melakukan akselerasi kemajuan dan pembangunan di daerah. Bahkan kalau bisa, kebijakan Transmigrasi bisa ditarik lagi ke pusat karena pusatlah yang lebih tahu kebutuhan sebaran penduduk berkualitas, akselerasi pembangunan serta untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerataan sebaran penduduk dalam program transmigrasi harus diikuti oleh kebijakan turunan berikutnya yaitu pembangunan pusat-pusat keunggulan harus lebih merata, tidak hanya terpusat di Jawa, tapi juga sudah harus mulai dibangun di daerah-daerah luar Jawa terutama daerah Indonesia Timur. Beberapa pusat keunggulan yang bisa dikembangkan di luar Jawa diantaranya pusat maritim dunia, pusat pengembangan sumber daya laut, program pendidikan unggulan untuk vokasi pertambangan, perkebunan, pusat riset inovasi berbasis maritim, pusat riset inovasi

perkebunan dan hasil hutan, pusat pengembangan pelatihan kerja unggulan dan lainnya.

6) Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing global.

Akses layanan pendidikan berkualitas, murah dan terjangkau baik ditingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi sangat diperlukan, khususnya untuk anak-anak yang berada di daerah terluar, tertinggal, terbelakang, daerah perbatasan, daerah miskin dan lainnya. Pemerintah perlu menyediakan minimal 2 SMP Negeri dan satu SMA Negeri di satu kecamatan. Lama sekolah anak-anak harus ditingkatkan tidak hanya sampai kelas 2 SMP tapi minimal sampai lulus SMA.

Sedangkan untuk mendukung serapan lulusan SMA/SMK atau sekolah vokasi ke dunia kerja, pemerintah membangun kemitraan dengan perusahaan swasta yang ada di lingkungannya. Program kemitraan misalnya melalui penyusunan kurikulum bersama, program magang siswa kerja, program direksi mengajar, program bantuan beasiswa kerja dan lainnya.

Untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing, pemerintah dan masyarakat perlu melakukan edukasi sosialisasi etos kerja dan produktifitas tinggi. Segala macam nilai sosial budaya yang menghambat etos kerja dan peningkatan produktifitas perlu dihilangkan. Budaya malas baca, tidak disiplin dan budaya saling serobot harus dihentikan. Indonesia perlu mengejar ketertinggalan dari Malaysia, Singapura, Jepang, dan Korea dengan meningkatkan etos kerja melalui peningkatan skill kompetensi dan daya saing.

Untuk menghasilkan SDM dalam bidang riset, pemerintah perlu memfasilitasi peningkatan riset-riset Inovasi. Riset inovatif hanya mungkin terjadi dalam iklim demokratis dan kebebasan akademik secara penuh, termasuk jaminan kesejahteraan yang tinggi dan memadai. Karena faktor kesejahteraan yang kurang memadai dan tidak ada kebebasan akademis membuat para

peneliti kita kurang mampu merumuskan tema-tema penelitian inovatif.

Kedepan, dengan adanya BRIN (Badan Riset Inovasi Nasional) yang akan menyatukan semua lembaga riset, diharapkan tema-tema riset tidak lagi tumpang tindih. BRIN harus mampu menjadi dirigen yang meng-*orchestra*-i seluruh kebutuhan riset, merumuskan permintaan riset tematik, inovatif, kreatif dan sangat menarik.

c. **Kebijakan di Bidang Pendidikan Untuk Dapat Menghasilkan SDM Indonesia yang Berdaya Saing Global.**

Anggaran pendidikan telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 20% dari APBN dan APBD (UUD NRI Tahun 1945 pasal 31, ayat 4), namun kualitas SDM Indonesia masih rendah, yang salah satunya ditentukan oleh kualitas pendidikan. Berdasarkan data PISA (*Programme for International Student Assessment*) tahun 2019 yang dibuat oleh OECD (*Organisation Economic Cooperation Development*) atau Organisasi Kerjasama Pembangunan dan Ekonomi yang menilai kemampuan membaca, matematika dan sains, Indonesia menempati urutan ke-72 dari 77 negara yang di survei, lebih rendah dan tertinggal dari pada Brunei dan Malaysia<sup>37</sup>. Mencermati data PISA yang dibuat OECD sebagaimana diuraikan diatas, untuk mengejar keteringgalan di bidang pendidikan dan ketrampilan (*skill*) perlu bekerja lebih keras, dengan:

- 1) Melakukan penyesuaian kurikulum yang disesuaikan permintaan pasar global, dengan bersinergi dan berkolaborasi dunia usaha dan industri, serta memperhatikan data yang dibuat OECD yaitu dengan meningkatkan kemampuan membaca, matematika dan sains.
- 2) Mendorong Perguruan Tinggi untuk fokus dalam pengembangan bidang ilmu yang menjadi unggulan dan terhubung dengan jejaring

<sup>37</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/maialah-50648395>. Diunduh tanggal 11 Juni 2020.

kerjasama riset, baik antar Perguruan Tinggi dan pusat-pusat penelitian di dalam maupun luar negeri.

- 3) Memperbanyak program pendidikan vokasi (kejuruan) baik tingkat menengah (SMK) maupun untuk pendidikan tinggi seperti politeknik dengan menyesuaikan kebutuhan lingkungan masyarakat.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan dan insentif bagi para ilmuwan Indonesia yang masih ada di luar negeri (*brain drain*) untuk kembali dan berkarya di Indonesia.
- 5) Memberikan ruang kebebasan akademik dan meningkatkan sarana prasarana bidang riset kepada para ilmuwan untuk mengembangkan riset-riset inovatif dalam mendorong pengembangan ekonomi kreatif, ekonomi digital berbasis teknologi industri 4.0.
- 6) Memberikan nilai tambah (*added value*) terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) melalui sentuhan pendekatan IPTEK sehingga bisa menjadi produk dan keunggulan komparatif yang kompetitif di dunia global.
- 7) Memberikan beasiswa unggulan kepada putra putri terbaik bangsa yang memiliki talenta, bakat dan potensi intelektual akademis untuk melanjutkan studinya sampai ke luar negeri (beasiswa S1-S3 dan *post doctoral*).



## BAB IV PENUTUP

### 16. Simpulan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dengan memperhatikan data dan fakta yang ada serta hasil analisa pembahasan, maka ada beberapa hal yang bisa disimpulkan dari pemanfaatan bonus demografi dalam meningkatkan daya saing global, yaitu:

- a. Pemerintah sudah memiliki Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dan *Roadmap* sebagai sebuah antisipasi menghadapi datangnya bonus demografi 2020-2045. Akan tetapi dalam implementasinya masih kurang maksimal karena ternyata tidak semua daerah merumuskan GDPK dan *roadmap* sesuai dengan *roadmap* nasional. Faktor penyebabnya antara lain karena keterbatasan kapasitas SDM dan kelembagaan daerah, kurangnya kesadaran (*awareness*) Pemerintah Daerah terhadap persoalan bonus demografi, masih adanya ego sektoral antar instansi, kurangnya sinergi dan koordinasi pusat dengan daerah, serta tidak terintegrasikannya GDPK dan *roadmap* dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, serta
- b. Kondisi daya saing dan kompetensi SDM Indonesia di dunia global masih sangat rendah dibandingkan negara-negara lain yang setara dengan Indonesia. Hal ini dikarenakan rendahnya kualitas pendidikan dan minimnya program pelatihan untuk pengembangan keterampilan, kurangnya hasil riset yang inovatif, kurangnya sebaran penduduk berkualitas serta kurang meratanya pembangunan pusat-pusat keunggulan wilayah.
- c. Kebijakan yang perlu dirumuskan untuk menghadapi pemanfaatan bonus demografi dalam meningkatkan daya saing global adalah perlunya upaya meningkatkan kualitas SDM melalui akses layanan pendidikan berkualitas yang didukung oleh pengembangan keterampilan, serta hasil riset inovatif yang sesuai kebutuhan dunia industri dan usaha.

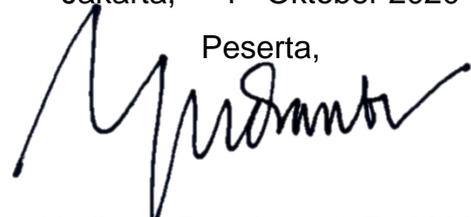
## 17. Rekomendasi.

Dengan memperhatikan hasil kesimpulan diatas, maka untuk mengoptimalkan pemanfaatan bonus demografi dalam meningkatkan daya saing bangsa, ada beberapa hal yang direkomendasikan, yaitu:

- a. Pemerintah pusat maupun daerah perlu secara serius, konsisten melaksanakan implementasi dan mengintegrasikan GDPK dalam perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas SDM melalui layanan pendidikan berkualitas dan terjangkau termasuk dalam situasi covid 19.
- b. Pemerintah perlu melakukan peningkatan percepatan program keluarga berencana untuk mengendalikan kuantitas penduduk, program transmigrasi untuk pemerataan sebaran penduduk berkualitas dalam rangka akslerasi pembangunan serta mengevaluasi kembali keterlibatannya dalam berbagai perjanjian kerjasama multilateral dan bilateral khususnya bidang perdagangan dan ketenagakerjaan yang sangat liberal sehingga tidak merugikan kepentingan bangsa Indonesia.
- c. Pemerintah perlu menjadikan isu pemanfaatan bonus demografi sebagai persoalan besar yang perlu menjadi fokus bersama seluruh komponen bangsa baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pihak swasta termasuk partai politik, masyarakat sipil, dunia pendidikan dan ketenagakerjaan. Dalam jangka panjang, pemanfaatan bonus demografi perlu masuk dalam kebijakan RPJPN dan RPJMN sehingga meskipun terjadi pergantian pejabat pemerintahan kebijakan tentang pemanfaatan bonus demografi tetap dilanjutkan dengan melakukan penyesuaian sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada saat itu.

Jakarta, 1 Oktober 2020

Peserta,



Yudianto Putrajaya, S.E., M.M.  
Nomor Peserta : 096

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku/Jurnal.

- a. Buku 1 “Grand Design Pembangunan Kependudukan 2011-2035” Hal. 27-32.
- b. Dorodjatun Kuntjorojakti. 2012. “Menerawang Indonesia Pada Dasawarsa Ketiga Abad ke-21”. Jakarta: Alvabet. Hal. 60-61
- c. Peter Drucker. 1992. “*The Age of Discontinuity; Guideliness to our Changing Society*”. London: Heinenman.
- d. Rangkuman Statistik Pendidikan Dasar dan Menengah 2017-2018, Pusat Data Statistik Pendidikan, Kemendikbud.
- e. Renstra Ristek Dikti 2015-2019, diterbitkan Kemenristek Dikti. hal. 17-19
- f. Thomas Malthus. 1826. “*An Essay the Principle of Population*”, John Murray, London. Juga bisa dilihat makalah lainnya Working Paper, *The Malthusian Trap and Development in PreIndustrial Societies: A View Differing from the Standard One* by Clem Tisdell And Serge Svizzero January 2015, The University of Quensland.
- g. Zuhal. 2010. “Knowledge and Innovation. Jakarta: Gramedia.

### 2. Internet.

- a. <https://berempat.com/news/4874/di-bawah-thailand-dan-filipina-indonesia-peringkat-ke-67-gtci-2019/>. Diunduh tanggal 8 Juni 2020.
- b. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-50648395>. Diunduh tanggal 11 Juni 2020.
- c. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200624103600-20-516800/perceraian-di-semarang-naik-3-kali-lipat-selama-wabah-corona>. Diunduh tanggal 6 Agustus 2020.
- d. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181127151827-92-349615/menaker-ungkap-tiga-masalah-wni-sulit-kerja-ke-luar-negeri>. Diunduh tanggal 11 Agustus 2020.
- e. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa>. Diunduh tanggal 8 Juni 2020.

- f. <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/grand-desain-pembangunan-kependudukan-atasi-dinamika-kependudukan-indonesia#:~:text=Sementara%20itu%2C%20berdasarkan%20Peraturan%20Presiden,yang%20berisi%20tentang%20isu%20penting>. Diunduh tanggal 11 Agustus 2020.
- g. [https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber\\_daya\\_alam](https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam). Diunduh tanggal 8 Juni 2020.
- h. [https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber\\_daya\\_manusia#:~:text=Sumber%200daya%20manusia%20\(SDM\)%20adalah,organisasi%2C%20baik%20institusi%20maupun%20perusahaan.&text=Pada%20hakikatnya%2C%20SDM%20berupa%20manusia,untuk%20mencapai%20tujuan%20organisasi%20itu](https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_manusia#:~:text=Sumber%200daya%20manusia%20(SDM)%20adalah,organisasi%2C%20baik%20institusi%20maupun%20perusahaan.&text=Pada%20hakikatnya%2C%20SDM%20berupa%20manusia,untuk%20mencapai%20tujuan%20organisasi%20itu). Diunduh tanggal 8 Juni 2020.
- i. [https://id.wikipedia.org/wiki/Migrasi\\_manusia#:~:text=Migrasi%20manusia%20adalah%20perpindahan%20penduduk,%2Fnegara%20\(migrasi%20internasional\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Migrasi_manusia#:~:text=Migrasi%20manusia%20adalah%20perpindahan%20penduduk,%2Fnegara%20(migrasi%20internasional)). Diunduh tanggal 8 Juni 2020.
- j. [https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan\\_Daya\\_Saing\\_Global](https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_Daya_Saing_Global). Diunduh tanggal 8 Juni 2020.
- k. <https://www.padamu.net/pengertian-bonus-demografi>. Diunduh tanggal 8 Juni 2020.
- l. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/20/110300923/lebih-dari-400.000-kehamilan-baru-terjadi-selama-pandemi-di-indonesia>. Diunduh tanggal 6 Agustus 2020.
- m. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/23/183000269/persebaran-penduduk-indonesia?page=all>. Diunduh tanggal 6 Agustus 2020.
- n. <https://money.kompas.com/read/2020/06/25/125033526/imf-covid-19-sebabkan-perekonomian-global-rugi-rp-168000-triliun>. Diunduh tanggal 11 Juni 2020.
- o. <https://nasional.kontan.co.id/news/peringkat-daya-saing-global-indonesia-turun-5-peringkat-menjadi-50-dunia>. Diunduh tanggal 8 Juni 2020.

ALUR PIKIR

PEMANFAATAN BONUS DEMOGRAFI DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI GLOBAL



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



1. Nama : Yudianto Putrajaya, S.E., M.M.
2. Pangkat/NRP : Kolonel Inf/ 11930075960670
3. Jabatan : Pamen Denma Mabasad
4. TTL : Manado, 26-06-1970
5. TMT TNI : 24-7-1993
6. Suku Bangsa : Jawa
7. Agama : Islam
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. Pendidikan Umum :
    - 1) SD Tahun 1984
    - 2) SMP Tahun 1987
    - 3) SMA Tahun 1988
    - 4) S-1 Tahun 2012
    - 5) S-2 Tahun 2013
  - b. Pendidikan Militer Umum:
    - 1) Akmil Tahun 1993
    - 2) Sussarcab Inf Tahun 1994
    - 3) Selapa Tahun 2002
    - 4) Seskoad Tahun 2007

c. Pendidikan Militer Spesialisasi:

- 1) Dik Para Dasar Tahun 1994
- 2) Sus Spes Bakduk Tahun 1995
- 3) Lat Komando Tahun 1995
- 4) TBM Tahun 1996
- 5) PJD Tahun 1998
- 6) Pur Kota Tahun 1999
- 7) Tar Tih Komando Tahun 2000
- 8) Sus Gadik TNI Tahun 2001
- 9) Suspa Intelter Tahun 2003
- 10) Dik Danrem Tahun 2018

9. Tanda Jasa :

- 
- 1) SL Kesetiaan VIII Tahun
  - 2) SL Seroja
  - 3) SL Dharma Nusa
  - 4) SL Dwija Sista
  - 5) SL Kesetiaan XVI Tahun
  - 6) SL Kesetiaan XXIV Tahun
  - 7) SL GOM IX
  - 8) SL Ksatria Yudha

10. Riwayat Penugasan :

a. Dalam Negeri :

- 
- 1) Ops Timor Timur Tahun 1996
  - 2) Ops Irian Jaya Tahun 1998
  - 3) Ops Aceh Tahun 2004

b. Luar Negeri :

- 1) Latma Singapura Tahun 2004
- 2) IPC Philipina Tahun 2007
- 3) Timnas PSSI ke Vietnam Tahun 2016
- 4) Timnas PSSI ke Tahunailand Tahun 2016
- 5) Timnas PSSI ke Malaysia Tahun 2016

11. Riwayat Jabatan :

- 1) Pama Pussenif Tahun 1993
- 2) Pama Kopassus Tahun 1995

- 3) Dan Unit-2 Den-3 Yon 21 Grup 2 Tahun 1996
- 4) Danton 1 Ki-3 Yon 22 Grup 2 Tahun 1996
- 5) Danki-2 Yon 22 Grup 2 Tahun 1997
- 6) Kasi Ops Yon 22 Grup 2 Tahun 2000
- 7) Kasi Log Yon 22 Grup 2 Tahun 2000
- 8) Kasi Intel Yon 23 Grup 2 Tahun 2001
- 9) Pama Grup 2 Tahun 2002
- 10) Ps. Kasi Pers Grup 2 Tahun 2002
- 11) Kasi Pers Grup 2 Tahun 2003
- 12) Paband Wat Pers Spers Kopassus Tahun 2004
- 13) Wadanyon 21 Grup 2 Tahun 2006
- 14) Pamen Kopassus Tahun 2007
- 15) Ps. Dansepara Kopassus Tahun 2007
- 16) Pgs. Danyon 12 Grup 1 Tahun 2008
- 17) Danyon 12 Grup 1 Tahun 2009
- 18) Pabandya Binkar Spers Kopassus Tahun 2010
- 19) Dandim 1309/Manado Tahun 2011
- 20) Waaspers Kasdiv 1 Kostrad Tahun 2012
- 21) Waaspers Kaskostrad Tahun 2013
- 22) Aspers Kasdiv 1 Kostrad Tahun 2014
- 23) Aspers Kasdam Jaya Tahun 2014
- 24) Aspers Kaskostrad Tahun 2015
- 25) Danrem 101/Ant Tahun 2017
- 26) Paban V/Bakti TNI Sterad Tahun 2018

12. Riwayat Keluarga :

- 1) Ayah : Pardji Setianto
- 2) Ibu : Endang Sri Ariyantinah
- 3) Istri : Siti Sadiyah, S.E.
- 4) Anak : (1) Adinda Putra Ramdhani  
(2) Dyfriq Akbar Adyahtara  
(3) Adindy Putri Maulidya